



BALAI BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
KEMENDIKDASMEN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

BALAI BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jalan Doktor Sujono, Kelurahan Jempang Baru, Kecamatan Jempang, Kabupaten Jember, Jawa Timur 66151
Email : kantarbahasantb@kemendikbud.go.id; Laman : www.kantarbahasantb.go.id

RENCANA STRATEGIS

BALAI BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2025–2029



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

CANTIK
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kolaboratif

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

**BANGGA,
MAHIR, DAN MAJU
DENGAN
BAHASA INDONESIA**



balaibahasaprovincintb.kemendikdasmen.go.id



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN
MENENGAH
BALAI BAHASA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram 83116

Ponsel 081217352004

Posel: balaibahasaprovincintb@kemendikdasmen.go.id; Laman: balaibahasaprovincintb.kemendikdasmen.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

NOMOR 2379/I5.18/BS.01.02/2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TAHUN 2025—2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Menimbang : a. bahwa untuk menjamin keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025–2029, perlu menetapkan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029;

b. Mengingat bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025—2029.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025- 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 385);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1050);
9. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; dan
10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Nomor 5889/I/BS.01.02/2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025—2029.

MEMUTUSKAN:

Menutuskan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TEMGGARA BARAT TAHUN 2025—2029

Pasal 1

Dalam Keputusan Kepala Balai Bahasa ini yang dimaksud dengan Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025—2029, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis, adalah dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, sasaran, indikator kinerja, serta kerangka regulasi dan kelembagaan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2025—2029.

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis disusun sebagai pedoman bagi setiap unit kerja dan unit pelaksana teknis di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsi sesuai arah kebijakan dan sasaran strategis.
- (2) Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. mewujudkan arah kebijakan pembangunan kebahasaan dan kesastraan yang selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
 - b. menjadi pedoman bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra;
 - c. meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kebahasaan dan kesastraan melalui penerapan prinsip tata kelola yang responsif, adaptif, melayani, akuntabel, dan harmonis; dan
 - d. menjadi dasar bagi penyusunan rencana kerja tahunan, rencana kinerja, dan evaluasi capaian kinerja Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2025 2029.

Pasal 3

Ruang lingkup Rencana Strategis ini meliputi:

- a. pendahuluan;
- b. visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
- c. arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan;
- d. target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
- e. penutup.

Pasal 4

Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini.

Pasal 5

Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Mataram

Pada tanggal 21 November 2025

Kepala



Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd.

★ NIP 196801201993032002



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

කළමනාකරණ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

BALAI BAHASA

බාලි භාෂා මාලා

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ඉන්දුනීසියාවේ බහු භාෂා ප්‍රදේශය

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

CANTIK
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kolaboratif

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

BANGGA,
MAHIR, DAN MAJU
DENGAN
BAHASA INDONESIA



Lampiran 1 : Surat Keputusan Kepala Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Nomor : 2379/I5.18/BS.01.02/2025
Tanggal : 21 November 2025

DOKUMEN RENCANA STRATEGIS
BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2025—2029

BAB I
PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara multibahasa dengan satu bahasa nasional (bahasa Indonesia), 718 bahasa daerah, dan puluhan bahasa asing. Keberagaman bahasa tersebut merupakan kekayaan dan modal sosial yang tak ternilai harganya bagi bangsa berpenduduk lebih dari 280 juta jiwa ini. Pada satu sisi, dalam keberagaman bahasa terkandung potensi bangsa untuk bersatu dan menjadi negara maju karena kemampuan bahasa menyimpan konsep dan daya ungkap yang merupakan sumber inovasi dan kreativitas. Namun, pada sisi lain, dalam keberagaman bahasa juga tersimpan potensi keterpecahbelahan karena berbagai perbedaan yang melekat di dalamnya. Oleh karena itu, diperlukan pengelolaan bahasa yang terpadu demi menjaga keutuhan bangsa, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan membawa bangsa ini menuju kemajuan peradaban.

Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan bagian dari mosaik kebinekaan bahasa di Indonesia yang memiliki kekayaan linguistik luar biasa. Di wilayah ini terdapat tiga bahasa daerah utama, yaitu bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo, yang digunakan oleh suku-suku asli yang telah mendiami Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sejak lama. Selain tiga bahasa daerah utama tersebut, terdapat pula delapan bahasa daerah lain yang telah menetap, hidup, dan berkembang di tengah masyarakat NTB, yaitu bahasa Jawa, Bali, Madura, Bugis, Selayar, Bajo, Mandarin, dan Arab. Kehadiran bahasa-bahasa tersebut mencerminkan dinamika sosial dan budaya masyarakat NTB yang terbuka terhadap interaksi antaretnis dan antarwilayah, sekaligus memperkaya khazanah kebahasaan Indonesia di tingkat regional.

Pengelolaan kebahasaan di Provinsi NTB dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi NTB dengan berlandaskan pada prinsip Trigatra Bangun Bahasa, yakni Utamakan Bahasa Indonesia, Lestarikan Bahasa Daerah, dan Kuasai Bahasa Asing. Melalui prinsip tersebut, Balai Bahasa Provinsi NTB berupaya mengutamakan bahasa Indonesia agar makin mantap sebagai sarana pemersatu dan peneguh jati diri bangsa di tengah masyarakat multibahasa. Pada saat yang sama, Balai Bahasa juga berkomitmen untuk melestarikan bahasa daerah—seperti Sasak, Samawa, dan Mbojo—sebagai akar identitas dan kekayaan budaya yang mencerminkan keindonesiaan di tingkat lokal. Selain itu, penguasaan berbagai bahasa asing terus didorong untuk meningkatkan daya saing sumber daya manusia di NTB dalam menghadapi tantangan global. Pengelolaan ketiga ranah kebahasaan tersebut secara terpadu dan berkelanjutan diarahkan untuk membentuk sumber daya manusia yang unggul serta



mewujudkan kedaulatan bahasa Indonesia—berdaulat di dalam negeri dan berwibawa di kancah internasional.

Pembentukan sumber daya manusia unggul merupakan amanat konstitusi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Balai Bahasa Provinsi NTB, bahasa memiliki peran strategis dalam mendukung pendidikan bermutu yang berkeadilan dan inklusif. Bahasa berfungsi sebagai sarana utama penyampaian ilmu pengetahuan, pembentuk pola pikir, penguat karakter, dan perekat sosial-budaya masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan bahasa menjadi bagian penting dalam pembangunan nasional bidang kebahasaan dan kesastraan. Balai Bahasa Provinsi NTB, sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, berkomitmen melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa serta sastra secara sistematis dan berkelanjutan guna memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara sekaligus sarana pemersatu bangsa. Semangat tersebut berpijak pada maklumat ketiga Sumpah Pemuda 1928 sebagai tonggak lahirnya jati diri dan kebanggaan nasional melalui bahasa Indonesia.

Sebagai unit pelaksana teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi NTB memiliki peran strategis dalam pembangunan kebahasaan dan kesastraan di wilayah NTB. Lembaga ini berkomitmen mengawal penguatan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah, serta peningkatan kompetensi berbahasa masyarakat sebagai bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Balai Bahasa Provinsi NTB tidak hanya menjadi penghubung dan pemersatu keragaman bahasa dan budaya di daerah, tetapi juga berkontribusi dalam memperkuat fungsi bahasa Indonesia sebagai sarana utama pendidikan, ilmu pengetahuan, dan pembentukan karakter bangsa.

Dalam menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, Balai Bahasa Provinsi NTB mengelola keterpaduan antara bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing secara seimbang dan berkesinambungan. Melalui sinergi antara bidang kebahasaan dan kesastraan, Balai Bahasa Provinsi NTB terus memperkuat perlindungan bahasa daerah seperti Sasak, Samawa, dan Mbojo, serta mendorong penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar, dan berwibawa di ruang publik. Dengan demikian, Balai Bahasa Provinsi NTB hadir sebagai garda terdepan penjaga kedaulatan bahasa, penguat identitas nasional, sekaligus penggerak kemajuan pendidikan dan kebudayaan di Nusa Tenggara Barat.

Rencana strategis tahun 2025—2029 ini harus selaras dengan agenda pemerintah yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang (RPJP) 2025—2045, jangka menengah (RPJMN) 2025—2029, Asta Cita presiden terpilih 2025—2029, dan prioritas dalam Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029 dan Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025—2029. Sebagai bagian dari penyusunan rencana strategis tersebut, berikut ini dikemukakan kondisi umum



dan potensi serta permasalahan bidang kebahasaan dan kesastraan yang dihadapi oleh Balai Bahasa Provinsi NTB saat ini.

1.1. Kondisi Umum

Selama periode 2020—2024, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menjalankan tiga program prioritas yang menjadi pilar utama pengelolaan kebahasaan dan kesastraan di daerah. Pertama, program pelindungan bahasa dan sastra, yang difokuskan pada upaya memperkuat eksistensi bahasa dan sastra daerah—terutama bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo—melalui kegiatan revitalisasi, penyusunan modul pembelajaran, bimbingan teknis guru master, serta pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat provinsi. Kedua, program literasi kebahasaan dan kesastraan, yang diarahkan untuk menumbuhkan karakter dan meningkatkan kemampuan literasi masyarakat, terutama generasi muda, melalui pembinaan penutur bahasa, pemberdayaan komunitas literasi, dan penyaluran bahan bacaan bermutu hingga ke wilayah 3T. Ketiga, program internasionalisasi bahasa Indonesia, yang bertujuan memperluas peran bahasa Indonesia di kancah global melalui fasilitasi lembaga pendidikan dan nonpendidikan dalam pengajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), serta penyusunan bahan ajar yang mendukung penguatan posisi bahasa Indonesia di dunia internasional.

Tiga program prioritas dilaksanakan dengan pendekatan kelompok kepakaran dan layanan profesional (KKLP) yang terdiri atas (1) Perkamusan dan Peristilahan, (2) Pemodernan dan Pelindungan, (3) Pembinaan dan Bahasa Hukum, (4) UKBI, (5) Literasi, (6) BIPA, dan (7) Penerjemahan. Semua pegawai teknis kebahasaan dan kesastraan bergabung ke dalam kelompok tersebut sesuai dengan kepakaran yang dimiliki.

Sepanjang kurun waktu tersebut, capaian pembangunan kebahasaan dan kesastraan di Nusa Tenggara Barat yang berbasis tiga program prioritas dirangkum sebagai berikut:

Program Pelindungan Bahasa dan Sastra	
	• 3 Bahasa Daerah yang Direvitalisasi (Sasak, Samawa, dan Mbojo) • 6 Modul Pembelajaran untuk Guru Master • 753 Guru Master/Utama • 776 Peserta pada Festival Tunas Bahasa Ibu • 130 Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah • 100 Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah

Program Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 2020—2024



- 5324 Penutur Bahasa Terbina
- 21 Produk Sastra Berkembangkan
- 280 Cerita Anak Terjemahan
- 172 Lembaga Terbina
- 138 Komunitas Literasi Terbina
- 32.497 Pejuji Kemahiran Bahasa Indonesia
- 12 Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra
- 6238 Kosakata Bahasa Daerah Sasak, Samawa, dan Mbojo yang Telah Diinventarisasi
- 584 Lema Bahasa Sasak; 417 Bahasa Samawa; 214 Bahasa Mbojo yang Telah Menjadi Kosakata Bahasa Indonesia per April 2025
- 5 Judul Cerita dan 18 desa Wisata Mitra Mandalika-Dewisali

Program Internasionalisasi Bahasa Indonesia



- 22 Lembaga Terfasilitasi BIPA
- 91 Pemelajar BIPA
- 6 Desa Wisata Mitra Mandalika BUMI

Program Pelindungan Bahasa dan Sastra

Program Pelindungan Bahasa dan Sastra Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020—2024 dilaksanakan melalui dua pendekatan berbeda sesuai konsep pelaksanaannya. Pada tahun 2020—2021, pelindungan bahasa dan sastra difokuskan langsung kepada pemuda berusia 10—19 tahun melalui pemberian materi Revitalisasi Bahasa Daerah dan Revitalisasi Sastra Daerah, terutama sastra lisan. Pada periode ini, keterlibatan generasi muda menjadi perhatian utama, tercermin dari partisipasi 130 penutur muda dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah serta 100 penutur muda lainnya dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah.

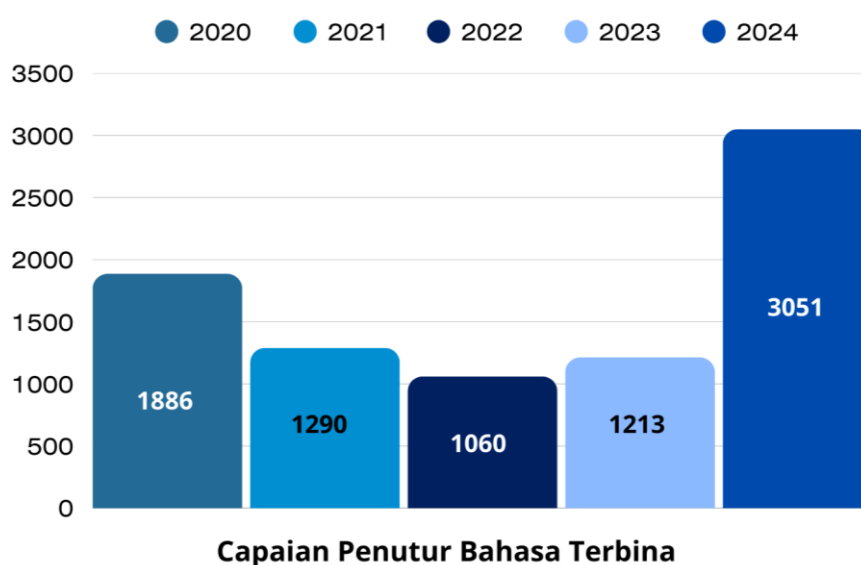
Memasuki tahun 2022—2024, konsep pelindungan bergeser menuju model Revitalisasi Bahasa Daerah yang lebih komprehensif dan terstruktur. Pelaksanaannya mencakup koordinasi dengan pemerintah daerah, penyusunan enam modul pembelajaran, serta penyelenggaraan bimbingan teknis bagi 753 Guru Utama/Master sebagai penggerak utama di sekolah dan komunitas. Selain itu, rangkaian kegiatan pengimbasan dan penyelenggaraan Festival Tunas Bahasa Ibu dilaksanakan mulai dari tingkat kabupaten/kota hingga tingkat provinsi, yang berhasil melibatkan 776 peserta. Program ini juga diperkuat melalui



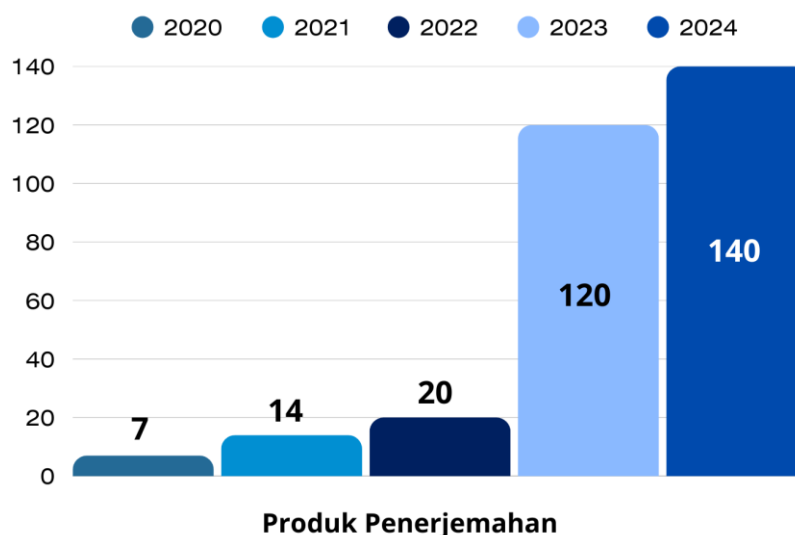
pelaksanaan Kemah Cerpen Bahasa Daerah dan partisipasi pada Festival Tunas Bahasa Ibu tingkat nasional. Secara keseluruhan, kegiatan tahun 2022—2024 makin memperkuat upaya revitalisasi tiga bahasa daerah—Sasak, Samawa, dan Mbojo—sekaligus menegaskan komitmen Balai Bahasa Provinsi NTB dalam menjaga keberlanjutan bahasa dan sastra daerah.

Program Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Tahun 2020—2024

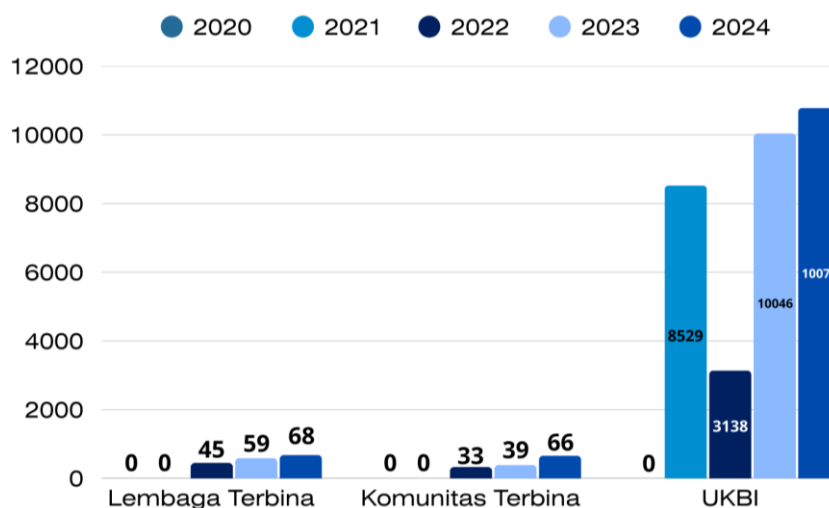
Program Literasi Kebahasaan dan Kesastraan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2020—2024 menunjukkan capaian yang luas dan beragam, mencakup peningkatan kompetensi bahasa, pengembangan sastra, pembinaan lembaga, hingga inventarisasi kosakata bahasa daerah. Dalam kurun lima tahun tersebut, sebanyak 8.500 penutur bahasa berhasil dibina melalui berbagai kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia, pemilihan duta bahasa, musikalisasi puisi, serta penguatan generasi muda terbina literasi yang menyasar anak usia sekolah dan masyarakat dari berbagai profesi. Pembinaan ini membentuk ekosistem literasi yang makin kuat di NTB dan memperluas akses masyarakat terhadap layanan kebahasaan dan kesastraan.



Pada tahun 2020—2021, pengembangan produk sastra terfokus pada penerjemahan cerita anak yang diadaptasi dari dongeng dan sastra lisan yang hidup di tengah masyarakat Sasak, Samawa, dan Mbojo, menghasilkan 21 produk sastra terkembangkan. Selanjutnya, pada periode 2022—2024, perhatian difokuskan pada penerjemahan karya baru dari para penulis muda NTB melalui sayembara dan bimbingan teknis penulisan cerita anak berbahasa daerah. Upaya ini menghasilkan 280 cerita anak terjemahan, yang sekaligus membuka ruang kreatif bagi generasi muda untuk berkontribusi dalam pelestarian sastra daerah.

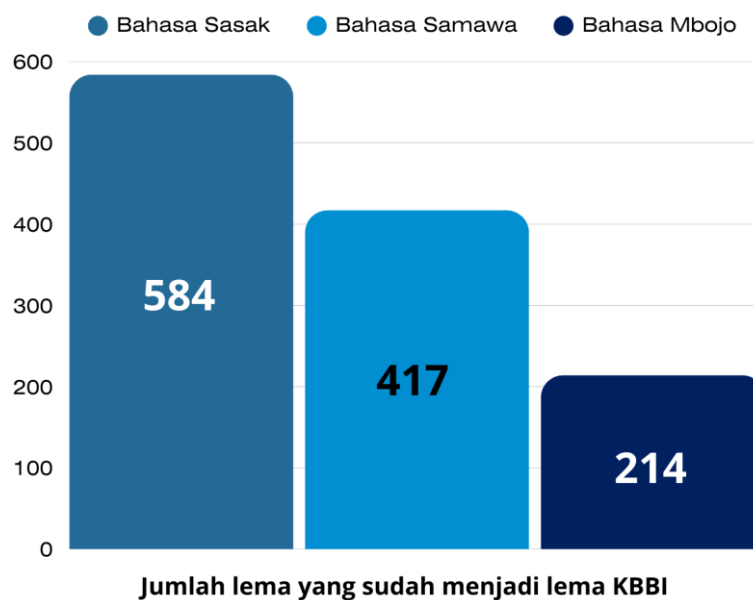
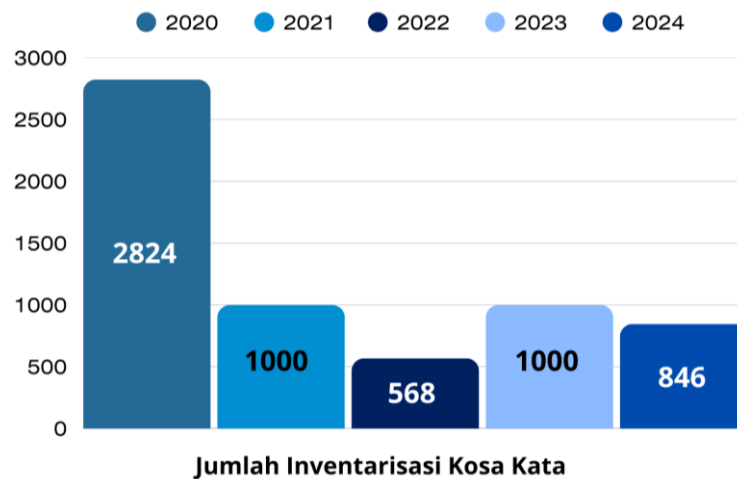


Pembinaan terhadap ekosistem literasi juga diperkuat melalui pendampingan 172 lembaga, baik lembaga pemerintah, swasta, maupun pendidikan, serta 138 komunitas literasi yang tersebar di berbagai daerah di NTB. Kegiatan ini berperan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan berkelanjutan. Selain itu, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (peuji) diikuti oleh 32.497 peserta yang terdiri atas siswa, mahasiswa, guru, dosen, pegawai pemerintah, dan masyarakat umum, menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia secara formal dan terukur.



Dalam bidang pengembangan bahasa dan sastra, Balai Bahasa Provinsi NTB menghasilkan 12 produk strategis berupa kamus bahasa Sasak–Indonesia, Samawa–Indonesia, Mbojo–Indonesia, ensiklopedia, kamus aksara braille, serta kamus anak bergambar. Upaya dokumentasi bahasa daerah juga berjalan signifikan dengan terinventarisasinya 6.238 kosakata bahasa Sasak, Samawa, dan Mbojo. Dari jumlah tersebut, 584 lema bahasa Sasak, 417 lema bahasa Samawa, dan 214 lema bahasa Mbojo telah resmi menjadi bagian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia per April 2025. Keseluruhan capaian ini menunjukkan komitmen kuat Balai Bahasa Provinsi NTB dalam memperkuat literasi, melestarikan bahasa daerah, dan memperkaya khazanah bahasa Indonesia.





Berbagai capaian dalam Program Literasi Kebahasaan dan Kesastraan tersebut semakin diperkuat melalui hadirnya Program Mandalika-Dewisali (Desa Wisata Literasi) sebagai inovasi unggulan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini menjadi jembatan antara upaya peningkatan literasi dengan pengembangan potensi desa wisata, sehingga kegiatan kebahasaan dan kesastraan tidak hanya tumbuh di lembaga pendidikan, tetapi juga menyatu dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat. Melalui layanan pembinaan, pendampingan, dan pengajaran literasi bagi pelaku desa wisata, Mandalika-Dewisali berhasil membina 11 desa dan sekolah pada tahun 2023 serta 7 desa dan sekolah pada tahun 2024.

Kehadiran program ini memberikan ruang baru bagi penguatan literasi di berbagai lokasi strategis, mulai dari Desa Bilebante, Desa Gili Maringkik, Desa Bonjeruk, hingga Perpustakaan Lembah Hijau dan Perpustakaan Keliling Bayan. Dengan menjangkau lembaga pendidikan serta komunitas di Lombok Tengah, Lombok Timur, Lombok Utara, dan Lombok Barat, Mandalika-Dewisali makin memperluas dampak program literasi yang telah dibangun pada periode 2020—2024. Inisiatif ini tidak hanya menumbuhkan minat baca dan kemampuan literasi masyarakat, tetapi juga mengintegrasikan nilai kebahasaan dan

kesastraan ke dalam pengembangan desa wisata berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat. Program Mandalika-Dewisali menjadi bukti komitmen Balai Bahasa Provinsi NTB dalam menghadirkan inovasi yang relevan, inklusif, dan berdampak langsung pada peningkatan kualitas literasi masyarakat.



Keberhasilan program Mandalika-Dewisali juga tercermin dari capaian nyata berupa terbitnya lima buku cerita anak hasil kegiatan kelas menulis di desa wisata binaan. Pada tahun



2023, lahir dua buku berjudul *Sumur Nyangget* dan *Durian Purba* dari kegiatan di Desa Bilebante, Lombok Tengah. Sementara pada tahun 2024, tiga buku baru berjudul *Sang Pengkalia Anak Gunung*, *Sangku Dait Loloan Istimiewe*, dan *Rahasia Dese Ajaip* diterbitkan melalui pembinaan di Perpustakaan Lembah Hijau, Lombok Timur. Karya-karya ini tidak hanya memperkaya khazanah literasi anak di Nusa Tenggara Barat, tetapi juga menjadi sarana pelestarian bahasa daerah serta media edukatif

yang mencerminkan nilai-nilai lokal. Dampak positif dari program ini terlihat pada meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya literasi dalam pengembangan pariwisata, serta munculnya produk literasi yang mampu mendukung promosi dan identitas budaya desa wisata.

Program Internasionalisasi Bahasa Indonesia

Program Internasionalisasi Bahasa Indonesia menjadi salah satu prioritas penting Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan capaian yang terus berkembang sepanjang tahun 2020—2024. Selama periode ini, Balai Bahasa berhasil memfasilitasi 22 lembaga penyelenggara BIPA serta mendampingi 91 pembelajar BIPA dari berbagai negara. Pembinaan

dilakukan melalui kerja sama dengan pegiat BIPA, APPBIPA NTB, desa wisata, pengajar BIPA, serta pemerintah daerah. Meskipun beberapa lembaga sempat terdampak pandemi Covid-19, kegiatan pembelajaran tetap berlangsung dan menunjukkan tren peningkatan. Hingga



tahun 2024, pembelajar BIPA yang mengikuti program ini berasal dari berbagai negara, seperti Australia, Amerika Serikat, Kanada, Rusia, Thailand, Taiwan, Korea, Prancis, Nigeria, Pakistan, dan Palestina, yang menunjukkan semakin besarnya minat warga asing untuk belajar bahasa Indonesia dan mengenal budaya

Nusantara melalui NTB.

Dampak program juga terlihat dari meningkatnya jumlah calon pengajar BIPA di daerah. Minat mahasiswa terhadap profesi ini semakin besar, terutama setelah dibukanya mata kuliah BIPA di Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP Universitas Mataram pada tahun 2023 yang diikuti oleh ratusan mahasiswa. Pembukaan mata kuliah tersebut menjadi langkah strategis dalam menyediakan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengajar BIPA di NTB sekaligus memperkuat ekosistem internasionalisasi bahasa Indonesia di wilayah tersebut. Dengan demikian, program BIPA di Balai Bahasa Provinsi NTB tidak hanya memperluas jejaring lembaga dan pembelajar, tetapi juga berkontribusi terhadap pengembangan kompetensi kebahasaan dan peningkatan citra bahasa Indonesia di kancah global.

Program Internasionalisasi Bahasa Indonesia yang telah memperluas jejaring lembaga dan meningkatkan jumlah pembelajar BIPA di Nusa Tenggara Barat semakin diperkuat dengan hadirnya inovasi Mandalika-BUMI (BIPA untuk Masyarakat Inovatif). Program ini menjadi pengembangan strategis dalam memperkenalkan bahasa Indonesia kepada masyarakat asing dan wisatawan melalui penyusunan serta penyediaan bahan ajar berbasis budaya lokal dan kearifan daerah NTB. Selain itu, Mandalika-BUMI turut memfasilitasi lembaga penyelenggara BIPA, memberikan pelatihan bagi para pengajar, serta menyediakan tenaga pengajar yang kompeten. Dengan menyasar kawasan desa wisata, seperti Bilebante, Bonjeruk, Taman Nasional Gunung Rinjani, Jage Kestare, Sekotong, dan Santong, program ini mengintegrasikan pembelajaran bahasa dengan pengalaman budaya dan pariwisata lokal, sehingga proses belajar bahasa



Indonesia menjadi lebih hidup, autentik, dan mendukung penuh penguatan program prioritas Internasionalisasi Bahasa Indonesia di NTB.

1.2. Tata Kelola

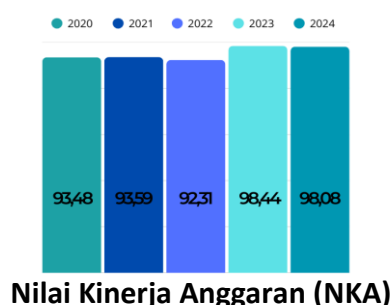
Tata kelola birokrasi yang profesional, bersih, efisien, efektif, dan produktif merupakan komponen penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Pada tahun 2024, indeks reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencapai 89,13 dengan predikat A (memuaskan), yang menunjukkan kemampuan Kemendikbudristek dalam memimpin perubahan menuju pemerintahan yang berorientasi pada hasil. Capaian tersebut melampaui rata-rata indeks reformasi birokrasi kementerian/lembaga secara nasional, yaitu 82,98, dan menjadi refleksi nyata dari keberhasilan penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di lingkungan kementerian.

Sebagai bagian dari implementasi reformasi birokrasi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat turut menunjukkan kinerja gemilang dengan meraih Predikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada tahun 2024. Prestasi ini merupakan wujud nyata komitmen Balai Bahasa Provinsi NTB dalam menerapkan nilai-nilai transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan capaian tersebut, Balai Bahasa Provinsi NTB tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemerintah, tetapi juga menjadi contoh satuan kerja yang konsisten dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, efektif, dan berintegritas tinggi dalam melayani dan mengembangkan kebahasaan serta kesastraan di Nusa Tenggara Barat.

Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya dalam meningkatkan indikator-indikator penilaian yang ada untuk mendukung ketercapaian Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di masa yang akan datang. Tabel 3 adalah beberapa capaian indikator penilaian dari tahun 2020 sampai 2024.

Tabel 1.1 Capaian Indikator Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)					
Nilai Kinerja Anggaran (NKA)	93,48	93,59	92,31	98,44	98,08



Berdasarkan data pada tabel, capaian indikator kinerja Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren yang positif dalam pelaksanaan tata kelola dan akuntabilitas kinerja. Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengalami peningkatan dari predikat BB (Baik Sekali) pada tahun 2020 dan 2021 menjadi A (Memuaskan) sejak tahun 2022 hingga 2024 yang mencerminkan meningkatnya efektivitas penerapan prinsip akuntabilitas dan kinerja berorientasi hasil. Sementara itu, Nilai Kinerja Anggaran (NKA) juga menunjukkan capaian yang konsisten tinggi, yaitu 93,48 pada tahun 2020, 93,59 pada tahun 2021, sedikit menurun menjadi 92,31 pada tahun 2022, tetapi kembali meningkat signifikan menjadi 98,44 pada tahun 2023 dan 98,08 pada tahun 2024. Peningkatan ini menandakan pengelolaan anggaran yang makin efisien, tepat sasaran, serta mendukung pencapaian *output* dan *outcome* program secara optimal

1.3. Potensi dan Permasalahan

1.3.1 Analisis SWOT Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

A. Kekuatan (*Strengths*)

1. Sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki sumber daya manusia yang kompeten, baik tenaga fungsional maupun pelaksana, yang menguasai bidang kebahasaan, kesastraan, dan literasi. Pegawai memiliki pengalaman panjang dalam pelaksanaan program pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa serta sastra, termasuk pelatihan, penelitian, dan pengujian kebahasaan. Kapasitas dan pengalaman ini menjadi modal penting dalam melaksanakan amanat lembaga secara efektif dan berkelanjutan.
2. Citra lembaga yang kredibel dengan pencapaian Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) pada tahun 2024, yang menjadi bukti pengakuan terhadap kinerja organisasi yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi. Capaian ini memperkuat citra lembaga di mata publik dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan dan program yang diselenggarakan.
3. Jaringan kemitraan dan kolaborasi yang luas. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Balai Bahasa Provinsi NTB telah menjalin kerja sama strategis dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, lembaga pendidikan, perguruan tinggi, komunitas literasi, media massa, dan organisasi masyarakat. Kolaborasi tersebut memperluas jangkauan program dan memperkuat sinergi lintas sektor untuk mendukung pengembangan dan pemertabatan bahasa serta sastra di wilayah NTB.
4. Konsistensi dalam pelaksanaan program prioritas nasional. Lembaga secara konsisten melaksanakan berbagai program prioritas yang ditetapkan oleh



Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, seperti Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka, revitalisasi bahasa daerah, pembinaan penggunaan bahasa di ruang publik, serta penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan. Konsistensi ini menunjukkan komitmen Balai Bahasa NTB dalam mendukung visi nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan.

5. Keragaman bahasa daerah sebagai modal besar. Wilayah Nusa Tenggara Barat memiliki keragaman bahasa daerah yang terdiri atas 11 bahasa, yaitu Sasak, Samawa, Mbojo, Jawa, Bali, Madura, Bugis, Selayar, Bajo, Mandarin, dan Arab. Keberagaman ini menjadi kekuatan sekaligus sumber daya bahasa dan sastra yang sangat berharga, baik untuk kegiatan pengembangan, dokumentasi, maupun pelestarian bahasa daerah.

B. Kelemahan (*Weaknesses*)

1. Keterbatasan jumlah pegawai dan tenaga fungsional. Jumlah pegawai di Balai Bahasa Provinsi NTB masih relatif sedikit dibandingkan dengan cakupan wilayah kerja dan banyaknya program yang harus dijalankan. Kondisi ini menyebabkan beban kerja pegawai cukup tinggi dan pelaksanaan kegiatan seringkali harus dilakukan dengan pembagian tugas yang sangat padat, sehingga berdampak pada efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program.
2. Pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal. Meskipun sudah menggunakan media digital untuk kegiatan publikasi dan administrasi, pemanfaatan teknologi informasi di bidang pengelolaan data, pengarsipan, dan layanan publik kebahasaan masih belum maksimal. Belum adanya sistem digital terintegrasi juga membatasi efisiensi dan jangkauan layanan kepada masyarakat luas.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan. Beberapa fasilitas penting seperti studio bahasa, ruang dokumentasi bahasa daerah, laboratorium kebahasaan, serta ruang pameran literasi belum tersedia secara memadai. Hal ini menghambat pengembangan inovasi program dan kegiatan kreatif yang seharusnya dapat memperkuat peran Balai Bahasa Provinsi NTB sebagai pusat aktivitas kebahasaan di daerah.
4. Keterbatasan anggaran operasional dan kegiatan. Keterbatasan alokasi anggaran mengakibatkan beberapa kegiatan pengembangan dan pembinaan tidak dapat dilaksanakan secara optimal, baik dari segi jumlah sasaran, frekuensi, maupun jangkauan wilayah. Kondisi ini juga berpengaruh terhadap kemampuan lembaga dalam melakukan inovasi program dan pengembangan kapasitas pegawai.
5. Keterbatasan publikasi kinerja yang hanya dilakukan melalui media sosial. Publikasi hasil kerja dan capaian kinerja Balai Bahasa Provinsi NTB saat ini



masih dominan dilakukan melalui media sosial. Akibatnya, jangkauan informasi terbatas hanya pada pengikut akun resmi lembaga, sementara masyarakat umum, akademisi, dan instansi lain belum sepenuhnya dapat mengakses informasi secara luas dan terstruktur.

C. Peluang (*Opportunities*)

1. Dukungan kebijakan nasional terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Program internasionalisasi bahasa Indonesia yang dicanangkan pemerintah menjadi peluang besar bagi Balai Bahasa Provinsi NTB untuk memperluas peran dalam pengajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, pengembangan materi ajar, dan kegiatan promosi kebahasaan di tingkat regional maupun internasional.
2. Perhatian pemerintah daerah terhadap pelestarian bahasa dan literasi. Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota di NTB menunjukkan kepedulian terhadap perlindungan bahasa daerah dan penguatan literasi masyarakat. Dukungan ini membuka peluang kerja sama dalam bentuk kegiatan bersama, pembentukan regulasi daerah, dan pendanaan program berbasis kearifan lokal.
3. Kerja sama dengan komunitas literasi dan dunia pendidikan. Meningkatnya partisipasi komunitas literasi, lembaga pendidikan, dan pegiat sastra di NTB memberikan kesempatan besar bagi Balai Bahasa untuk memperluas jejaring mitra dalam kegiatan pembinaan literasi, penulisan kreatif, lomba kebahasaan, serta festival sastra daerah.
4. Perkembangan teknologi digital sebagai media penguatan program. Teknologi digital, termasuk platform media sosial, laman interaktif, dan aplikasi pembelajaran daring, menjadi sarana efektif untuk memperluas jangkauan program. Pemanfaatan teknologi dapat mempercepat diseminasi informasi kebahasaan, publikasi karya sastra, dan interaksi dengan masyarakat.
5. Potensi besar bahasa dan sastra daerah NTB sebagai daya ungkit ekonomi kreatif. Bahasa dan sastra daerah dapat dikembangkan menjadi produk budaya dan ekonomi kreatif, seperti penerjemahan, dokumenter bahasa, seni pertunjukan berbasis sastra, dan penerbitan lokal. Hal ini berpotensi meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap bahasa daerah sekaligus menumbuhkan ekonomi berbasis budaya lokal.

D. Ancaman (*Threats*)

1. Menurunnya penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda. Pergeseran bahasa di kalangan generasi muda yang cenderung lebih banyak menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa asing menyebabkan ancaman terhadap keberlangsungan bahasa daerah. Jika tidak segera ditangani melalui revitalisasi dan edukasi, beberapa bahasa daerah berpotensi terancam punah.



2. Pengaruh bahasa asing dan bahasa gaul di media sosial. Maraknya penggunaan bahasa campuran dan istilah populer di media sosial berpotensi menurunkan mutu penggunaan bahasa Indonesia. Fenomena ini menimbulkan tantangan besar bagi upaya pembinaan bahasa yang baik dan benar di ruang publik.
3. Perubahan kebijakan dan struktur organisasi pemerintah. Dinamika kebijakan nasional, termasuk penyesuaian struktur organisasi dan mekanisme pendanaan, dapat berdampak pada kesinambungan program Balai Bahasa. Ketergantungan terhadap arah kebijakan pusat menuntut adaptasi cepat agar lembaga tetap relevan dan responsif terhadap kebutuhan daerah.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya penggunaan bahasa yang baik dan benar. Masih rendahnya kesadaran sebagian masyarakat dalam menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan sesuai kaidah dalam dokumen resmi, media publik, dan ruang digital menjadi tantangan tersendiri bagi lembaga dalam upaya pembinaan dan pengawasan kebahasaan.
5. Ketergantungan tinggi terhadap pendanaan dari pusat. Keterbatasan kemampuan untuk menggali sumber pendanaan alternatif di luar alokasi APBN menyebabkan pelaksanaan program sangat bergantung pada kebijakan dan kondisi fiskal nasional. Hal ini dapat membatasi fleksibilitas lembaga dalam menjawab kebutuhan dan potensi kebahasaan di daerah.

1.3.2 Potensi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Revitalisasi bahasa daerah didukung oleh kekayaan dan vitalitas bahasa lokal. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki tiga bahasa daerah utama, yaitu Sasak, Samawa, dan Mbojo, yang masih digunakan secara luas di berbagai wilayah. Kekayaan bahasa daerah ini menjadi potensi kuat dalam pelaksanaan program revitalisasi yang dicanangkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dukungan pemerintah daerah, lembaga pendidikan, serta komunitas budaya semakin memperkuat implementasi program tersebut. Revitalisasi ini tidak hanya melestarikan bahasa daerah sebagai identitas kultural, tetapi juga menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap warisan linguistiknya.
2. Penguatan literasi membaca dan menulis dilakukan melalui penyediaan buku bacaan bermutu lokal kontekstual. Upaya peningkatan budaya literasi di NTB semakin berkembang seiring dengan tersedianya bahan bacaan bermutu yang mengangkat nilai-nilai lokal dan konteks budaya daerah. Buku-buku cerita anak, antologi puisi, dan bahan ajar berbasis kearifan lokal menjadi sarana penting untuk menumbuhkan minat baca masyarakat, terutama peserta didik di jenjang pendidikan dasar. Balai Bahasa Provinsi NTB bersama komunitas literasi dan sekolah-sekolah terus mendorong penerbitan serta pemanfaatan bahan bacaan



yang sesuai dengan kebutuhan pembaca, sehingga literasi membaca dan menulis menjadi lebih bermakna dan berakar pada kehidupan masyarakat NTB.

3. Potensi penginternasionalan bahasa Indonesia dilakukan melalui program BIPA di daerah wisata Mandalika dan sekitarnya. Sebagai wilayah pariwisata unggulan yang menarik wisatawan mancanegara, NTB memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pengembangan Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA). Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika dan destinasi wisata lainnya seperti Gili Trawangan, Sumbawa, dan Bima dapat dijadikan lokasi strategis untuk pelaksanaan kursus BIPA yang menyasar wisatawan, tenaga kerja asing, maupun pelajar internasional. Potensi ini tidak hanya memperluas fungsi bahasa Indonesia di ranah global, tetapi juga memperkenalkan budaya dan kearifan lokal NTB ke dunia internasional.
4. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kekayaan tradisi sastra lisan, budaya tutur, dan kearifan lokal yang menjadi sumber inspirasi bagi lahirnya karya sastra modern. Keberadaan komunitas sastra dan literasi yang aktif di berbagai daerah, seperti Lombok, Sumbawa, dan Bima, juga memperkuat ekosistem kesastraan daerah. Dukungan ini mendorong tumbuhnya generasi penulis muda yang memanfaatkan media digital untuk mengekspresikan gagasan kreatif, sehingga karya sastra NTB semakin dikenal dan relevan dengan perkembangan zaman.

1.3.3 Permasalahan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

1. Penggunaan bahasa daerah menurun di tengah generasi muda dan pengaruh kuat budaya luar. Meskipun revitalisasi bahasa daerah telah dilaksanakan di berbagai kabupaten/kota, masih terdapat tantangan besar berupa menurunnya jumlah penutur aktif, terutama di kalangan remaja dan anak-anak. Pengaruh media digital, dominasi bahasa Indonesia dan bahasa asing, serta kurangnya motivasi generasi muda untuk mempelajari bahasa daerah menyebabkan proses revitalisasi berjalan tidak merata. Diperlukan strategi yang lebih kreatif dan adaptif, seperti penggunaan media digital dan pendekatan berbasis komunitas untuk menarik minat generasi muda dalam melestarikan bahasa ibu mereka.
2. Bahan bacaan bermutu terbatas dan rendahnya keterampilan literasi membaca-menulis di daerah. Upaya penguatan literasi di NTB masih menghadapi kendala pada ketersediaan buku bacaan yang sesuai dengan karakter dan kebutuhan pembaca di daerah. Di beberapa wilayah, bahan bacaan bermutu belum tersebar merata, sementara kemampuan membaca pemahaman dan menulis kreatif peserta didik masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan pelatihan bagi guru dalam memanfaatkan bahan bacaan literasi juga menjadi faktor penghambat dalam membangun budaya literasi yang kuat dan berkelanjutan.



3. Pengembangan program BIPA di kawasan wisata NTB belum optimal. Walaupun NTB memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata internasional, pemanfaatan peluang untuk pengembangan program BIPA masih sangat terbatas. Belum banyak lembaga pendidikan, pelaku pariwisata, atau institusi bahasa yang mengintegrasikan pengajaran bahasa Indonesia bagi wisatawan dan tenaga kerja asing. Selain itu, masih minimnya tenaga pengajar bersertifikat BIPA serta belum adanya kerja sama strategis antara lembaga bahasa dan pengelola kawasan wisata seperti Mandalika menjadi kendala dalam memperluas jangkauan dan dampak program BIPA di NTB.
4. Karya sastra lokal NTB masih menghadapi keterbatasan ruang publikasi, dokumentasi, dan pembinaan yang berkelanjutan. Banyak karya sastra, baik sastra lisan maupun modern, belum terdokumentasi secara sistematis, sementara pendampingan bagi penulis muda masih minim. Kondisi ini membuat karya sastra daerah belum memperoleh apresiasi optimal di tingkat nasional, serta berisiko hilang jika tidak segera dilestarikan dan dikembangkan melalui program yang terarah.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

2.1 Visi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Visi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dirumuskan dengan berpedoman pada visi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Tahun 2025—2029 dan visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025—2029, yaitu **“Terwujudnya pendidikan bermutu untuk semua dengan dukungan partisipasi semesta dalam rangka mewujudkan bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045 melalui Bahasa dan Sastra di Nusa Tenggara Barat”**. Sebagai bagian dari satuan kerja di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat turut berperan dalam mendukung upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas melalui peningkatan mutu pendidikan, khususnya dalam bidang kebahasaan dan kesastraan di Nusa Tenggara Barat.

Dalam mewujudkan visi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan tugas dan fungsi kebahasaannya dengan berlandaskan nilai-nilai *Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis (RAMAH)* sebagaimana komitmen Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Prinsip tersebut menjadi dasar dalam perumusan kebijakan dan pelaksanaan program yang berorientasi pada pelayanan publik yang profesional, berintegritas, serta inovatif, sehingga mampu mendukung terciptanya pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkarakter sesuai semangat gotong royong untuk mewujudkan Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045

2.2 Misi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Sesuai tugas dan kewenangannya, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melaksanakan misi Menteri dengan penjabaran misi terkait peningkatan kualitas manusia Indonesia, kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, dan pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya. Misi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

1. Meningkatkan literasi kebahasaan dan kesastraan di Nusa Tenggara Barat.
2. Mewujudkan kemartabatan bahasa Indonesia di Nusa Tenggara Barat.
3. Mewujudkan kelestarian bahasa dan sastra daerah di Nusa Tenggara Barat.
4. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional di Nusa Tenggara Barat.
5. Mewujudkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang responsif, akuntabel, melayani, adaptif, dan harmonis (RAMAH).



2.3 Tujuan dan Indikator Tujuan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Perumusan tujuan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ditujukan untuk menggambarkan ukuran terlaksananya visi-misi Menteri sesuai dengan bidang tugas Balai Bahasa. Adapun Tujuan dan Indikator Tujuan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada Tujuan dan Indikator Tujuan Kementerian dan telah mengacu juga pada Tujuan dan Indikator Tujuan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu sebagai berikut.

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Target Keberhasilan 2029
1	Penguatan Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional (a) Literasi Membaca dan (b) Numerasi	76,62
2	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat	1. Indeks Pembangunan Kebahasaan	55,01
		2. Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia	55,87
3	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	90,30

2.4 Sasaran Strategis Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan dua sasaran strategis yang mengacu pada Sasaran Strategis Kementerian serta Sasaran Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan pembangunan yang akan dicapai tahun 2029.



Tabel 2.2 Sasaran Strategis Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran Strategis
1	Menguatnya Mutu Layanan Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan
2	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaannya dalam dunia pendidikan dan masyarakat	Meningkatnya kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan
3	Menguatnya sistem tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	Meningkatnya tata kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel

2.5 Sasaran Program Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam upaya mencapai sasaran strategis, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada empat sasaran program tahun 2025—2029 yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Secara terperinci, sasaran program beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3 Sasaran Program Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

No.	Sasaran Program	Indikator Sasaran Program	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya kualitas pembelajaran, kompetensi, dan karakter pada pendidikan anak usia dini, dasar, menengah, khusus, layanan khusus, dan kesetaraan	Persentase Satuan Pendidikan yang peserta didiknya meningkat kualitas literasi membaca	64	68	72	76	80
2	Meningkatnya Pengembangan,	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
		Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan	48,13	49,45	50,15	50,73	51,6



	pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia	Pembinaan Bahasa dan Sastra					
		Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89
		Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	54,42	55,14	55,86	56,58	57,29
		Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	55	55,50	56	56,50	57
		Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	1,4	2,3	3,3	4,2	5,6
3	Meningkatnya kualitas tata kelola Kementerian	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Provinsi NTB	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
		Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Provinsi NTB	A	A	A	A	AA

2.6 Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Dalam upaya mencapai sasaran program, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Badan menetapkan tujuh sasaran kegiatan tahun 2025—2029 yang di-*cascading* dari sasaran



kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2025—2029. Secara terperinci sasaran kegiatan beserta indikatornya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4 Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi						
SK.1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik						
IKK 1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80
IKK 1.2	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	24	30	36	42	48
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK.2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia						
IKK 2.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesi	Persentase	41	43	45	47	49
IKK 2.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persentase	60	63	66	69	72
SK.3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan						
IKK 3.1	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persentase	59,93	63,13	66,34	69,54	72,75
IKK 3.2	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persentase	50	55	60	65	70
SK.4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra						
IKK 4.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	11,55	23,10	34,66	46,21	57,76
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah						
SK.5	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra						
IKK 5.1	Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Persentase	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8



IKK 5.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1:18	1:20	1:22	1:25	1:30
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK. 6	Meningkatnya Fasilitas terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA						
IKK 6.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persentase	55	55,5	56	56,5	57
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
SK.7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat						
IKK 7.1	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Provinsi NTB	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK 7.2	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat minimal A	Predikat	A	A	A	A	A

2.7 Manajemen Risiko Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Manajemen risiko pembangunan kebahasaan dan kesastraan di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan pendekatan yang sistematis dan terarah untuk mengidentifikasi, menilai, serta menentukan langkah terbaik dalam menghadapi potensi risiko yang dapat menghambat pencapaian sasaran dan tujuan organisasi. Sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan nasional di bidang kebahasaan dan kesastraan, penerapan manajemen risiko di lingkungan Balai Bahasa Provinsi NTB berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional. Peraturan tersebut menegaskan bahwa manajemen risiko pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan entitas penanggung jawab maupun pengelola kebijakan terhadap berbagai risiko pembangunan. Dalam konteks pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi NTB, penerapan manajemen risiko mencakup identifikasi sasaran program kebahasaan dan kesastraan, penentuan indikasi risiko, penyusunan langkah penanganan atau mitigasi risiko yang realistis dan terukur, serta penetapan pemilik dan pengelola risiko di setiap kegiatan agar pelaksanaan program berjalan efektif, efisien, dan berkelanjutan.



Tabel 2.5 Potensi Risiko Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Penanganan Risiko	Penanggung Jawab Risiko	
				Pemilik Risiko	Pengelola Risiko
1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik	Rendahnya minat baca peserta didik dan terbatasnya kegiatan literasi di sekolah	Melaksanakan pendampingan dan kampanye Gerakan Literasi Sekolah secara rutin minimal dua kali per tahun di tiap kabupaten/kota	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan
		Produk terjemahan tidak sesuai dengan kebutuhan atau konteks pembelajaran	Melakukan uji keterbacaan dan uji manfaat produk terjemahan di minimal 3 sekolah sasaran sebelum distribusi massal	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan
2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia	Rendahnya partisipasi penutur profesi dalam uji UKBI	Menjalin kerja sama dengan instansi dan lembaga profesi untuk menjadikan UKBI sebagai bagian dari peningkatan kompetensi pegawai	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan
		Kurangnya kegiatan pembinaan dan sosialisasi bahasa di lembaga dan komunitas	Menambah frekuensi kegiatan Pembinaan Bahasa Indonesia minimal empat kali per tahun di wilayah prioritas	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan
3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan	Rendahnya komitmen lembaga untuk menerapkan rekomendasi hasil pembinaan	Melakukan monitoring pascapembinaan dan memberikan penghargaan bagi lembaga dengan kepatuhan berbahasa terbaik tiap tahun	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan
		Terbatasnya kapasitas dan keberlanjutan program komunitas literasi	Menyelenggarakan pelatihan penguatan manajemen komunitas literasi dan memberikan pendampingan minimal satu kali per semester	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pembinaan

4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra	Terbatasnya sumber daya peneliti dan validator dalam proses pengembangan dan validasi produk kebahasaan serta kesastraan	Melakukan kolaborasi lintas unit dan melibatkan mitra akademisi atau pakar eksternal untuk mempercepat validasi produk minimal dua kali setahun	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pengembangan
5	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra	Kurangnya data kebahasaan dan kesastraan daerah yang mutakhir akibat keterbatasan survei lapangan	Menyusun jadwal pemutakhiran data dan melibatkan enumerator daerah untuk pelaksanaan survei dan verifikasi minimal satu kali per tahun	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pelindungan
		Minimnya jumlah guru utama atau fasilitator bahasa daerah di wilayah pelaksanaan revitalisasi	Menyelenggarakan pelatihan calon pengajar bahasa daerah bekerja sama dengan dinas pendidikan dan komunitas bahasa minimal satu kali per tahun	Kepala Balai	Ketua Tim Kerja Pelindungan
6	Meningkatnya Fasilitasi terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA	Rendahnya minat dan kesiapan lembaga pariwisata atau pendidikan di NTB untuk menyelenggarakan program BIPA	Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan teknis penyusunan program BIPA di lembaga potensial minimal dua kali per tahun di kawasan wisata seperti Mandalika dan Gili Trawangan	Kepala Balai	Ketua tim Kerja Pengembangan
7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat	Ketidaktepatan waktu pelaksanaan kegiatan dan pelaporan keuangan yang berpotensi menurunkan nilai kinerja anggaran	Melakukan monitoring dan evaluasi realisasi anggaran secara berkala setiap triwulan serta memperkuat koordinasi antara pejabat perencana, PPK, dan bendahara kegiatan untuk memastikan ketepatan waktu pelaporan	Kepala Balai	Kepala Subbagian Umum



		Keterlambatan dalam penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan kinerja (Renstra, PK, dan Rencana Aksi, dan Laporan Kinerja) yang memengaruhi penilaian akuntabilitas	Menetapkan jadwal penyusunan dokumen kinerja dengan tenggat internal lebih awal dan membentuk tim penyusun Lakin yang terintegrasi dengan perencanaan dan SPI untuk memastikan kelengkapan bukti dukung penilaian	Kepala Balai	Kepala Subbagian Umum
--	--	--	---	--------------	-----------------------





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

කළමනාකරණ පාලන කළමනාකරණ

BALAI BAHASA

කළමනාකරණ

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ආරක්ෂා සහ සහතික කළ

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

CANTIK
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kolaboratif

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

**BANGGA,
MAHIR, DAN MAJU
DENGAN
BAHASA INDONESIA**



BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan pada Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat mengacu pada arah kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Arah kebijakan dan strategi kementerian telah mengacu pada arah kebijakan dan strategi nasional yang diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025—2029. RPJMN Tahun 2025—2029 memuat 8 (delapan) Prioritas Nasional pembangunan jangka menengah yang merupakan wujud implementasi langsung dari Asta Cita yang merupakan misi dari Presiden dan Wakil Presiden, dengan penjabaran Prioritas Nasional sebagai berikut.

1. Memperkokoh ideologi pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah dalam negeri.
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.
7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba.
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Arah kebijakan, strategi, serta program dan kegiatan Kemendikdasmen selaras dengan Prioritas Nasional butir 4 (empat) dan 8 (delapan) berikut.

- | | |
|-----------------------|---|
| Prioritas Nasional 4: | Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas. |
| Prioritas Nasional 8: | Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi |



antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur.

Arah kebijakan Kemendikdasmen selaras untuk mendukung Prioritas Nasional 8 dalam rangka memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Tabel 3.1 Sasaran Strategis dalam mendukung Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Prioritas Nasional 8

No	Arah Kebijakan dan Strategi Nasional	Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	
1	Pelestarian dan pemajuan kebudayaan serta penguatan karakter bangsa	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan

Arah kebijakan dan strategi yang disusun oleh Kemendikdasmen dalam rangka mendukung pemerataan akses pendidikan, peningkatan kualitas pembelajaran, sinergisitas pendidikan vokasi dengan dunia usaha/dunia industri, pembangunan kebahasaan dan kesastraan, dan penguatan tata kelola Kementerian. Hal tersebut juga mendukung program visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, serta mendukung keberlanjutan program Prioritas Nasional dalam mewujudkan Indonesia Emas Tahun 2045.

Secara umum, kontribusi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kemendikdasmen dalam menopang agenda pembangunan sebagai berikut.

1. Penguatan Mutu Layanan, dan Kualitas Pembelajaran dan Pengajaran, Kurikulum, dan Model Pembelajaran, serta Penilaian Pendidikan

- Penguatan penerapan model pembelajaran yang berfokus pada penguatan kompetensi dasar peserta didik, seperti literasi, numerasi, serta pendidikan matematika, sains, teknologi sejak usia dini.
- Peningkatan bahan ajar dan bahan belajar yang berkualitas, aman, dan berisi ilmu pengetahuan yang kaya untuk penguatan pengetahuan peserta didik, dan mendukung proses belajar dan mengajar yang berkualitas.
- Penguatan literasi melalui penyediaan bahan bacaan bermutu yang relevan dengan konteks pembelajaran, mudah diakses peserta didik, serta mendukung pengembangan kecakapan literasi.



2. Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Bahasa Daerah dan Penginternasionalan Bahasa Indonesia

- a. Revitalisasi bahasa daerah antara lain dengan pemberdayaan komunitas pelestari bahasa dan sastra daerah, penguatan literasi dan pelestarian bahasa daerah, serta pemanfaatan kecerdasan artifisial untuk pelestarian bahasa daerah.
- b. Pengembangan sastra dan apresiasi sastra Indonesia guna melestarikan sastra daerah dan memperluas pengakuan sastra Indonesia di kancah global melalui pemanfaatan buku sastra, pengadaan buku sastra baru untuk berbagai jenjang usia sejak PAUD sampai dengan SMA, penguatan pembelajaran sastra dalam kurikulum dan program penulisan buku sastra baru untuk berbagai jenjang pendidikan.
- c. Mendorong peningkatan generasi muda dan penutur bahasa untuk memperkuat kecintaan dan kompetensi generasi muda terhadap bahasa daerah dan bahasa Indonesia.
- d. Penguatan pembinaan dan pengembangan bahasa dalam memperkuat keindonesiaan, mengembangkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, memperkuat bahasa lokal, mengembangkan bahasa Indonesia, menguasai bahasa asing bagi peserta didik dan tenaga pendidik.
- e. Penginternasionalan bahasa Indonesia dengan peningkatan fasilitasi pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing, penginternasionalan sastra Indonesia, peningkatan penggunaan bahasa Indonesia dalam forum internasional, serta penerapan Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia.

3. Penguatan Tata Kelola serta Akuntabilitas Kementerian

- a. Memberikan pelayanan yang RAMAH (Responsif, Adaptif, Melayani, Akuntabel, dan Harmonis) dan SANTUN (Setia, Amanah, Negarawan, Teladan, Unggul, dan Ngemong).
- b. Memastikan pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pendidikan yang transparan di tingkat pusat dan daerah.
- c. Melanjutkan reformasi struktural Kementerian untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja unit kerja.

Arah kebijakan dan strategi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025—2029 diturunkan dari arah kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2025—2029. Arah kebijakan bidang kebahasaan dan kesastraan ditujukan pada empat fokus utama sebagai berikut.

1. Peningkatan Kecakapan Literasi

Literasi bagi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup, serta menjadi fondasi utama dalam membangun masyarakat yang cerdas berbahasa dan berbudaya.



Literasi berhubungan erat dengan kemampuan memahami, menggunakan, dan mengolah bahasa, sehingga peningkatan kecakapan literasi dilakukan melalui berbagai program yang menumbuhkan budaya baca-tulis, memperkuat daya nalar kritis, serta mengembangkan apresiasi terhadap bahasa dan sastra Indonesia. Upaya ini dilaksanakan melalui sinergi antara tiga ranah utama—sekolah, keluarga, dan masyarakat—dengan fokus di ranah sekolah melalui kemitraan bersama kepala sekolah, guru, dan komite sekolah. Balai Bahasa NTB juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan mutu pembelajaran dengan dua strategi utama: peningkatan akses terhadap bahan bacaan bermutu dan penguatan kompetensi literasi bagi pendidik serta tenaga kependidikan. Melalui penyediaan berbagai produk kebahasaan dan kesastraan seperti buku teks, komik, karya sastra dialihwahanakan, kamus pelajar, dan buku audio, Balai Bahasa NTB berupaya menumbuhkan minat baca masyarakat, khususnya di sekolah-sekolah dengan tingkat literasi rendah, baik melalui distribusi langsung maupun akses daring melalui portal literasi

Peningkatan Kecakapan Literasi

Akses

Penyediaan

- Buku bermutu (buku teks, buku audio, buku video, buku braile, komik)
- Karya sastra yang dialihwahanakan
- Kamus dan produk kodifikasi bagi pelajar
- Produk penerjemahan lintas bahasa

Modifikasi/inovasi:

- Buku besar (*big book*), buku teka teki, buku musik

Kompetensi

Pembinaan

SDM Pendidikan

- Pendidik
- Peserta didik
- Tenaga kependidikan

Satuan Pendidikan

- Ruang publik
- Dokumen (laporan, persuratan, naskah dinas)

(jenjang SD, SMP, dan SMA)

Modifikasi/inovasi:

- Lomba puisi, monolog, drama, pidato, dsb.

Pembelajaran Mendalam

(Berkesadaran, Bermakna, Menyenangkan)

Badan Bahasa.

Selain memperluas akses literasi, Balai Bahasa NTB berkomitmen mendukung pembelajaran mendalam (*deep learning*) yang dilaksanakan melalui tiga prinsip utama yaitu berkesadaran (*mindful*), bermakna (*meaningful*), dan menyenangkan (*joyful*) sesuai arah kebijakan Kemendikdasmen melalui pengembangan media pembelajaran inovatif seperti *big book*, buku permainan kata, dan buku audio interaktif. Pembinaan literasi diarahkan pada dua sasaran utama, yakni peningkatan kapasitas pendidik dan pembinaan satuan pendidikan dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik di ruang publik dan dokumen sekolah. Penggunaan bahasa yang benar di lingkungan sekolah menjadi contoh nyata bagi peserta didik dalam kehidupan sehari-hari. Untuk memperkuat semangat literasi, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mengembangkan kegiatan kreatif seperti lomba puisi, drama, monolog, dan pidato yang mendorong keberanian berekspresi,



kemampuan berpikir kritis, dan kegembiraan dalam belajar. Melalui pendekatan ini, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berupaya membangun ekosistem literasi yang kontekstual, inklusif, dan berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat NTB yang literat dan berdaya saing.

2. Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia

Dalam rangka mendukung pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan serangkaian program strategis yang bertujuan meningkatkan kedudukan, martabat, dan penghargaan terhadap bahasa Indonesia serta karya sastra Indonesia, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemartabatan ini tidak hanya menekankan pada aspek penggunaan bahasa yang baik dan benar, tetapi juga pada penguatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra Indonesia melalui pendekatan kognitif (pemikiran), afektif (rasa), dan konatif (tindakan). Sasaran utama dari program ini adalah masyarakat umum di luar jalur pendidikan formal, dengan fokus pada penyediaan produk pengembangan bahasa, pembinaan sumber daya manusia, pengujian kemahiran berbahasa, serta pembinaan lembaga dan komunitas yang bergerak di bidang kebahasaan dan kesastraan. Upaya ini merupakan bagian dari gerakan kolektif yang menempatkan bahasa dan sastra Indonesia sebagai simbol identitas dan kebanggaan nasional yang harus dijaga dan dikembangkan secara berkelanjutan.

Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia



Sebagai landasan hukum dan arah kebijakan, Balai Bahasa Provinsi NTB akan mengacu pada dua regulasi penting, yaitu Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.4/7466/SJ tentang Pelaksanaan Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia serta Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Daerah. Kedua regulasi ini memperkuat posisi pemartabatan bahasa dan sastra Indonesia di daerah, sekaligus memberikan acuan yang jelas bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan program kebahasaan dan kesastraan. Sebagai tindak lanjut, Balai

Bahasa NTB akan melaksanakan konsolidasi daerah bersama pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk membentuk tim pengawas penggunaan bahasa Indonesia yang terdiri atas unsur Sekretaris Daerah, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Dinas Pendidikan, dan Balai Bahasa. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah ini akan menjadi prioritas dalam rencana strategis Balai Bahasa NTB, guna memastikan bahwa pemertabatan bahasa dan sastra Indonesia berjalan secara sistematis, terukur, dan berdampak luas bagi masyarakat.

3. Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah

Dalam konteks pelaksanaan pelestarian bahasa dan sastra daerah, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk mempertahankan dan menghidupkan kembali bahasa serta sastra daerah sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas budaya masyarakat. Upaya ini mencakup kegiatan yang dirancang untuk memastikan bahasa dan sastra daerah tetap digunakan, dipelajari, dan diwariskan lintas generasi, sehingga tidak mengalami kepunahan atau kehilangan fungsi sosialnya. Pelestarian ini dilandasi oleh kesadaran bahwa setiap bahasa dan karya sastra daerah menyimpan pengetahuan lokal, nilai-nilai budaya, dan kearifan yang telah terakumulasi selama berabad-abad. Kehilangan satu bahasa berarti kehilangan satu cara pandang dunia, dan oleh karena itu, pelestarian menjadi tanggung jawab bersama yang harus diemban dengan serius.



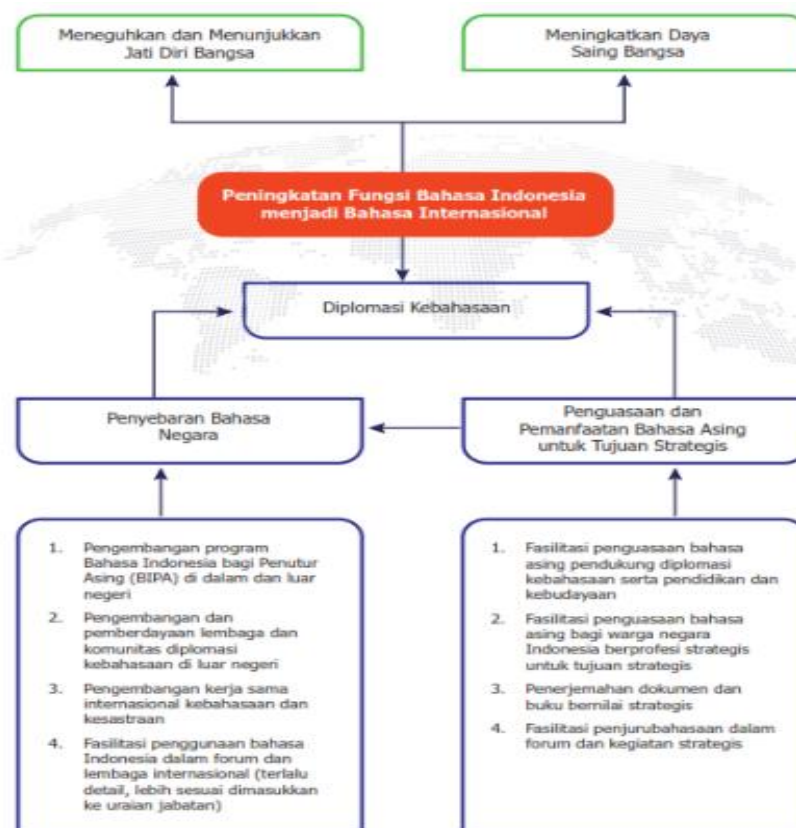
Sejalan dengan penetapan UNESCO tentang Dekade Internasional Bahasa Daerah (2022—2032), Balai Bahasa NTB mengembangkan program-program pelestarian yang mencakup pemetaan bahasa dan sastra daerah, dokumentasi dan digitalisasi aksara, revitalisasi bahasa yang terancam punah, serta konservasi karya sastra lisan dan tulis. Pelaksanaan program ini menekankan pendekatan partisipatif dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti pemerintah daerah, komunitas adat, lembaga pendidikan, dan generasi muda. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan ekosistem pelestarian yang berkelanjutan dan berakar kuat di masyarakat. Dengan strategi ini, Balai Bahasa NTB tidak hanya menjaga keberlangsungan bahasa dan sastra



daerah, tetapi juga memperkuat hak asasi berbahasa masyarakat serta memperkaya khazanah budaya nasional dan dunia.

4. Penginternasionalan Bahasa Indonesia

Dalam rangka mendukung amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan program penginternasionalan bahasa dan sastra Indonesia sebagai bagian dari upaya strategis untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Upaya ini bertujuan memperluas fungsi dan jangkauan bahasa Indonesia di berbagai ranah global, termasuk pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan, dan keamanan. Penginternasionalan ini tidak hanya menempatkan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi lintas bangsa, tetapi juga sebagai representasi identitas nasional yang mampu bersaing dan berkontribusi dalam percakapan global. Sastra Indonesia pun diangkat sebagai kekayaan intelektual dan budaya yang layak diapresiasi oleh masyarakat dunia. Sebagai bentuk konkret dari pendekatan pendidikan, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat akan mengembangkan dan memperluas pelaksanaan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA), baik melalui pengajaran langsung maupun penyediaan bahan ajar dan media pembelajaran digital. Selain itu, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berkolaborasi dengan para pelaku wisata di desa-desa wisata untuk memperkenalkan bahasa Indonesia kepada wisatawan asing dalam program Mandalika BUMI. Dengan sinergi antara program BIPA dan promosi wisata Balai Bahasa NTB berperan aktif dalam



membuka ruang diplomasi bahasa dan sastra Indonesia, serta memperkuat posisi Indonesia dalam peta kebahasaan dunia

Strategi pelaksanaan program melalui jalur fungsional dilaksanakan dengan memfokuskan kepakaran pegawai yang dimiliki oleh Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan kepakaran tersebut, para pegawai dikelompokkan ke dalam lima tim kerja di tingkat pusat dan tiga tim kerja di tingkat UPT yaitu terdiri atas (1) Tim Kerja Pengembangan; (2) Tim Kerja Pelindungan; dan (3) Tim Kerja Pembinaan. Koordinasi pelaksanaan program antara Tim Kerja Pusat dan UPT digambarkan sebagai berikut.

Penanggung Jawab	Tim Kerja Pusat	Tim Kerja UPT
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Perkamusan dan Peristilahan	Tim Kerja Pengembangan
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing	
Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Pemodernan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Pelindungan
Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia	Tim Kerja Pembinaan
	Tim Kerja Literasi	
	Tim Kerja Pembinaan Bahasa dan Hukum	
Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra	Tim Kerja Penerjemahan	

3.2 Kerangka Regulasi

Sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menjalankan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada kerangka regulasi yang ditetapkan oleh Badan Bahasa. Seluruh program, layanan, serta tata kelola kelembagaan disusun dan dilaksanakan sesuai dengan kebijakan, standar, dan pedoman nasional yang mengatur pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra. Dengan berlandaskan regulasi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan bahwa setiap langkah operasional selaras dengan arah kebijakan nasional, memiliki legitimasi yang kuat, serta mampu memberikan kontribusi yang konsisten dan terukur dalam mendukung misi Badan Bahasa di tingkat daerah.



Tabel 3.2 Kerangka Regulasi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi yang Berlaku, Kajian, dan Penelitian	Target Penyelesaian
1	Perubahan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	1. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia perlu direvisi karena sudah tidak relevan. 2. Regulasi ini bertujuan untuk mengatur standar kemahiran berbahasa Indonesia yang lebih sesuai dengan kebutuhan mutakhir. 3. Sebagai upaya membentuk payung hukum untuk pemutakhiran layanan UKBI yang saat ini dilaksanakan secara daring.	Tahun 2025—2026
2	Rancangan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah tentang Indeks Pembangunan Kebahasaan	1. Penyusunan Indeks Pembangunan Kebahasaan merupakan instrumen penting untuk mengukur efektivitas upaya pelestarian, pembinaan, dan pengembangan bahasa. 2. Indeks ini berfungsi sebagai alat evaluasi untuk memantau pencapaian kebijakan kebahasaan di tingkat nasional dan regional, membantu pembuat kebijakan menilai efektivitas kebijakan yang ada, serta merumuskan strategi baru yang lebih tepat sasaran. Dengan adanya indeks ini, kebijakan kebahasaan dapat lebih akurat, strategis, dan berbasis data, sehingga meningkatkan kualitas kebahasaan di Indonesia. 3. Selain itu, Indeks Pembangunan Kebahasaan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran bahasa dalam pembangunan nasional.	Tahun 2025—2026
3	Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Penginternasionalan Bahasa Indonesia	1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023.	Tahun 2026

		2. Belum adanya regulasi yang memuat ketentuan terpadu untuk menunaikan amanat peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional sebagaimana dimandatkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 Pasal 44. 3. Regulasi tingkat Perpres diperlukan agar mengatur peran dari tiap K/L dalam menunaikan amanat UU 24/2009 tersebut.	
4	Peraturan Presiden tentang Rencana Induk dan Peta Jalan Terpadu Gerakan Literasi	1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023. 2. Program literasi tersebar di berbagai kementerian/ lembaga. Perlu ada peta jalan terpadu untuk menyinkronkan semua program tersebut. 3. Regulasi tingkat Perpres diperlukan agar mampu mengatur peran dari tiap K/L dalam program literasi. 4. Naskah akademik pernah disusun oleh Kemenko PMK sehingga Kemendikdasmen tidak memulai pembahasan dari nol.	Tahun 2027
5	Peraturan Presiden tentang Peta Jalan Pewarisan dan Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah	1. Peta jalan ini merupakan amanat Kongres Bahasa Indonesia XII Tahun 2023. 2. Indonesia memiliki 718 bahasa daerah yang harus dilestarikan sesuai dengan amanat UUD. 3. Pelestarian bahasa daerah merupakan isu internasional, nasional, dan lokal. 4. Unesco memutuskan tahun 2022—2032 sebagai Dekade Internasional Bahasa Daerah.	Tahun 2026



3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran organisasi sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan dukungan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, tata kelola, dan manajemen aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. Dukungan tersebut diperlukan agar Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. Dengan adanya kerangka kelembagaan ini, penataan organisasi dapat diselaraskan dengan pencapaian sasaran organisasi, peningkatan efektivitas dan efisiensi struktur organisasi, dan pencegahan terjadinya duplikasi tugas dan fungsi.

3.3.1 Struktur Organisasi

Menteri Pendidikan Nasional melalui Surat Keputusan Nomor 157/O/2003 tanggal 17 Oktober 2003 menyetujui pembentukan lima buah Kantor Bahasa di lima provinsi, salah satunya di Nusa Tenggara Barat. Keputusan ini kemudian diperkuat melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 tentang Keberadaan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada awal berdirinya, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menempati ruang di Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sejak akhir tahun 2006 mulai menempati kantor baru yang beralamatkan di Jalan Dokter Sujono, Kelurahan Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram. Pada tanggal 27 September 2024, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat resmi menjadi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

Sejak berdirinya sampai saat ini, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah dipimpin oleh enam orang, yaitu Prof. Dr. Mahsun, M.S. (2004—2009), Dra. Yeyen Maryani, M.Hum. (Plt. 2009—2012), Dr. Syarifuddin, M.Hum. (2012—2018), Drs. Songgo Siruah, M.Pd. (2018—Mei 2019), Dr. Umi Kulsum, S.S., M.Hum. (Juni 2019—Mei 2022), Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.Hum. (Juni 2022—Februari 2025), dan Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd. (Maret 2025—sekarang).

Tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah jelas diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa. Balai Bahasa merupakan unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di bidang kebahasaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Saat ini, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dipimpin oleh Dra. Dwi Pratiwi, M.Pd. Susunan Organisasi Balai Bahasa Provinsi NTB terdiri atas:

- a. Kepala;
- b. Kepala Subbagian Umum, dan



c. Kelompok Jabatan Fungsional.

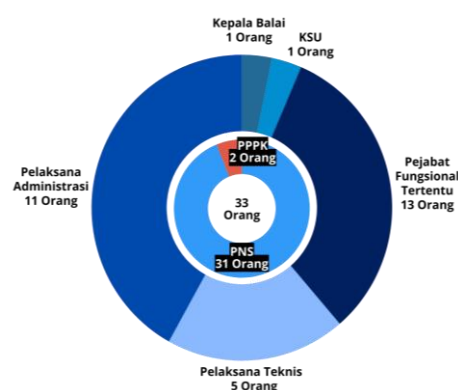
Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

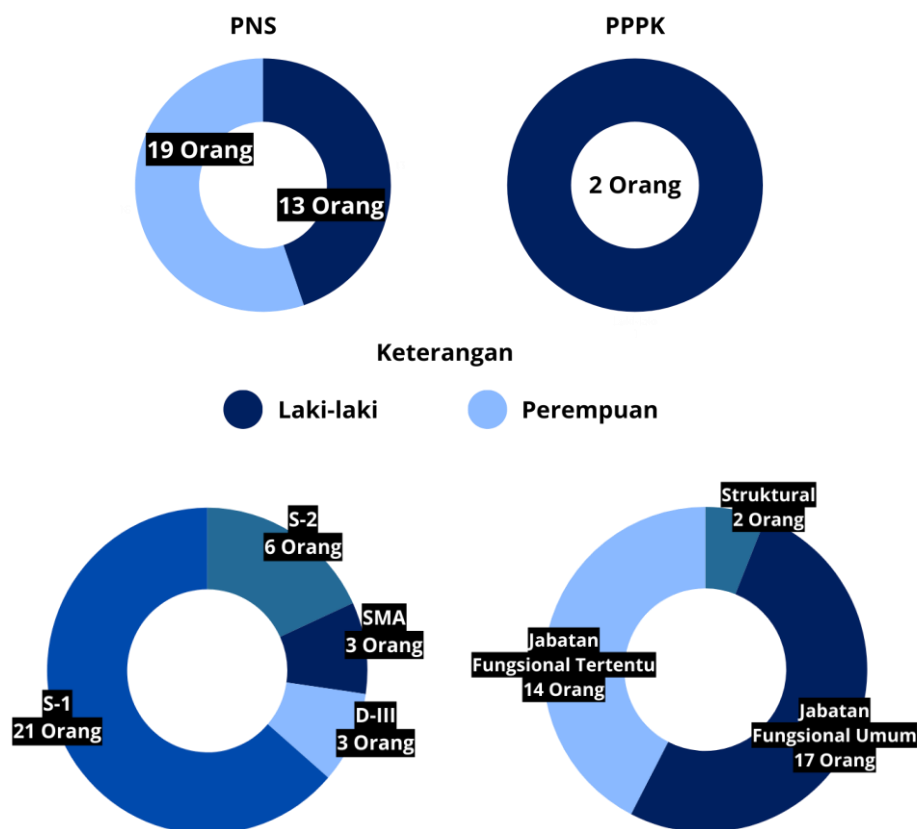


Gambar Struktur Organisasi Balai Bahasa Provinsi NTB

3.3.2 Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Secara kelembagaan, pada tahun 2025 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh 33 orang aparatur sipil negara (ASN) yang terdiri atas 31 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 1 PPPK Paruh Waktu. Jabatan ASN di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri atas 1 kepala balai, 1 kepala subbagian umum, 13 pejabat fungsional tertentu, 5 pelaksana teknis, 11 pelaksana administrasi, dan 2 PPPK. Secara rinci, jumlah sumber daya manusia di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat dilihat dalam infografis berikut.





Kebutuhan SDM hingga tahun 2029 disusun berdasarkan peta jabatan setingkat eselon III yang menggambarkan struktur organisasi Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara menyeluruh. Perencanaan ini memastikan ketersediaan jumlah dan kualifikasi pegawai yang selaras dengan tugas, fungsi, serta beban kerja pada setiap unit pelayanan.

Tabel 3.3 kebutuhan SDM Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

No	Nama Jabatan	Jumlah	No	Nama Jabatan	Jumlah
1	Arsiparis Ahli Muda	1	18	Penata Laksana Barang Terampil	1
2	Arsiparis Ahli Pertama	1	19	Widyabasa Ahli Madya	5
3	Arsiparis Penyelia	1	20	Widyabasa Ahli Muda	5
4	Arsiparis Mahir	1	21	Widyabasa Ahli Pertama	6
5	Arsiparis Terampil	1	21	Penerjemah Ahli Madya	8
6	Pustakawan Ahli Pertama	1	22	Penerjemah Ahli Muda	3
7	Pustakawan Mahir	1	23	Penerjemah Ahli Pertama	4
8	Pustakawan Terampil	1	24	Penyuluh Bahasa	4
9	Analisis Anggaran Ahli Pertama	3	25	Perencana Ahli Muda	2
10	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	1	26	Perencana Ahli Pertama	2
11	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	1	27	Pranata Komputer Ahli Pertama	3
12	Pranata Keuangan APBN Penyelia	1	28	Perevitaslisasi Bahasa dan Sastra	1

13	Pranata Keuangan APBN Mahir	1
14	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	1
15	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	1
16	Pranata SDM Aparatur Mahir	1
17	Pranata SDM Aparatur Terampil	1

29	Penelaah Teknis Kebijakan	2
30	Pengolah Data dan Informasi	15
31	Pengadministrasi perkantoran	5
32	Operator Layanan Operasional	6

3.3.3 Reformasi Birokrasi

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan bagian dari implementasi Reformasi Birokrasi yang diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Upaya ini berlandaskan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, yang menekankan pentingnya perubahan sistem, pola pikir, serta budaya kerja aparatur menuju birokrasi yang berintegritas tinggi dan berorientasi pada kinerja. Sejak pencanangan ZI-WBK pada tahun 2021, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat secara konsisten melaksanakan berbagai tahapan penguatan pembangunan, mulai dari tahap wawancara dengan Tim Penilai Nasional (TPN) pada tahun 2022 hingga tahap administrasi pada tahun 2023. Komitmen dan kerja berkelanjutan tersebut akhirnya membuahkan hasil pada tahun 2024, ketika Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berhasil meraih predikat sebagai satuan kerja berpredikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Pencapaian ini menjadi bukti nyata kesungguhan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas di bidang kebahasaan dan kesastraan.



Implementasi Reformasi Birokrasi tidak hanya berfokus pada perbaikan sistem dan tata kelola, tetapi juga menuntut perubahan pola pikir serta pembentukan budaya kerja baru yang berorientasi pada nilai integritas, profesionalisme, dan pelayanan publik yang berkualitas.



Reformasi ini sangat erat kaitannya dengan upaya membangun budaya anti korupsi, pelayanan prima, dan kinerja tinggi yang menjadi fondasi dalam menciptakan organisasi yang bersih dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam konteks Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, nilai-nilai tersebut diwujudkan melalui budaya kerja “RAMAH” dan “SANTUN”. Budaya kerja RAMAH mencerminkan sikap Responsif, Akuntabel, Melayani, Adaptif, dan Harmonis, yang menekankan pentingnya keterbukaan, tanggung jawab, dan kepedulian dalam memberikan layanan pendidikan. Sementara itu, SANTUN bermakna Setia, Amanah, Ngemong, Teladan, Unggul, dan Negarawan, yang menggambarkan karakter aparatur yang berintegritas, berkomitmen pada nilai kebangsaan, serta berorientasi pada pengembangan mutu dan pembinaan yang berkelanjutan. Kedua nilai tersebut menjadi landasan moral dan etika kerja bagi seluruh pegawai, termasuk di Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menjalankan Reformasi Birokrasi secara berkelanjutan menuju Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).



Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik melalui penerapan nilai CANTIK, yang merupakan akronim dari Cepat, Akuntabel, Netral, Transparan, Inovatif, dan Kolaboratif. Slogan ini menjadi wujud nyata perubahan budaya kerja yang selaras dengan arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sekaligus merupakan penjabaran dari nilai-nilai RAMAH dan SANTUN yang telah menjadi landasan budaya kerja di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Melalui internalisasi nilai CANTIK, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat terus berupaya meningkatkan kualitas layanan publik secara profesional, efektif, dan berintegritas. Implementasi budaya kerja ini juga sejalan dengan pelaksanaan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang telah dicanangkan sejak tahun 2021. Proses pembangunan zona integritas tersebut menjadi peluang bagi satuan kerja untuk memperkuat sistem kerja, memperbaiki tata kelola, dan meningkatkan kinerja layanan, sekaligus menjadi tantangan dalam mengubah pola pikir serta budaya kerja aparatur. Oleh karena itu, menggerakkan seluruh pegawai agar menginternalisasi nilai RAMAH, SANTUN, dan CANTIK sebagai satu kesatuan menjadi langkah

penting dalam menghadapi dinamika perubahan birokrasi. Upaya ini membutuhkan kepemimpinan yang kuat, konsisten, dan menjadi teladan dalam menumbuhkan semangat perubahan menuju organisasi yang bersih, melayani, dan berprestasi.





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

කළමනාකරණ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය

BALAI BAHASA

සාහිත්‍ය මාලාව

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ඉන්දුනීසියානු පළාතකරය

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

CANTIK
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kolaboratif

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

**BANGGA,
MAHIR, DAN MAJU
DENGAN
BAHASA INDONESIA**



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan serta mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di Wilayah Nusa Tenggara Barat menetapkan sasaran-sasaran yang merupakan kondisi yang ingin dicapai. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ikut berkontribusi dalam pencapaian keberhasilan sasaran yang diukur dengan indikator-indikator kinerja tahun 2025—2029 sebagai berikut.

Tabel 4.1 Target Sasaran Strategis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Kode	Sasaran Strategis (SS)/ Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SS 2	Meningkatnya Hasil Belajar Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesetaraan						
IKSS 2.2	Persentase Peserta Didik Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum dalam Asesmen Kompetensi Tingkat Nasional: a. Literasi Membaca	Persentase	68,62	70,62	72,62	74,62	76,62
SS 3	Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan						
IKSS 3.1	Indeks Pembangunan Kebahasaan	Indeks	51,31	52,72	53,46	54,08	55,01
IKSS 3.2	Indeks Penginternasionalan Bahasa Indonesia	Indeks	52,73	53,5	54,28	55,07	55,87
SS 5	Meningkatnya Tata Kelola Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang Partisipatif, Transparan, dan Akuntabilitas						
IKSS 5.1	Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian	Indeks	89,35	90	90,10	90,20	90,30

Tabel 4.2 Sasaran Program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 2	Meningkatnya Kualitas Pembelajaran, Kompetensi, dan Karakter pada Pendidikan Anak Usia Dini, Dasar, Menengah, Khusus, Layanan Khusus, dan Kesenjangan						
IKP 2.2.19	Persentase Satuan Pendidikan yang Peserta Didiknya Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80



Kode	Sasaran Program (SP)/ Indikator Kinerja Program (IKP)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SP 3	Meningkatnya Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia						
IKP 3.1.1	Angka Kemahiran Berbahasa Indonesia	Angka	82,52	83,02	83,52	84,02	84,52
IKP 3.1.2	Persentase Komunitas Bahasa dan Sastra yang Melaksanakan Pembinaan Bahasa dan Sastra	Persentase	48,13	49,45	50,15	50,73	51,6
IKP 3.1.3	Angka Pemanfaatan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra untuk Pengembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni	Persentase	11,09	11,39	11,55	11,68	11,89
IKP 3.1.4	Indeks Pelestarian Bahasa Daerah (IPBD)	Indeks	54,42	55,14	55,86	56,58	57,29
IKP 3.2.1	Persentase Pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing yang Terfasilitasi Standar Kompetensi Lulusan	Persentase	55	55,5	56	56,5	57
IKP 3.2.2	Persentase Lembaga Internasional yang Memanfaatkan Program Diplomasi Kebahasaan dan Kesastraan	Persentase	1,4	2,3	3,3	4,2	5,6
SP 5	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Kementerian						
IKP 5.1.27	Capaian Nilai Kinerja Anggaran Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKP 5.1.28	Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A	A	A	A	AA



Tabel 4.3 Target Kinerja Kegiatan Balai Bahasa Provisi Nusa Tenggara Barat
Tahun 2025—2029

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi						
SK 1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik						
IKK 1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80
IKK 1.2	Persentase Produk Penerjemahan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	24	30	36	42	48
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK 2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia						
IKK 2.1	Persentase Penutur Teruji yang Sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesi nya	Persentase	41	43	45	47	49
IKK 2.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persentase	60	63	66	69	72
SK 3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan						
IKK 3.1	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persentase	59,93	63,13	66,34	69,54	72,75
IKK 3.2	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persentase	50	55	60	65	70
SK 4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra						
IKK 4.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	11,55	23,1	34,66	46,21	57,76
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah						
SK 5	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra						
IKK 5.1	Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Persentase	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8
IKK 5.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	01:18	01:20	01:22	01:25	01:30
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia						

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6	Meningkatnya Fasilitas Terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA						
IKK 6.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi Dalam Negeri	Persentase	55	55,5	56	56,5	57
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
SK 7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
IKK 7.1	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
IKK 7.2	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A	Predikat	A	A	A	A	A

4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka melaksanakan amanat pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah Nusa Tenggara Barat serta mendukung peningkatan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat memerlukan kerangka pendanaan yang terencana dan berkelanjutan. Penyusunan kerangka pendanaan ini mengacu pada ketentuan pendanaan fungsi pendidikan, serta mempertimbangkan program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Dengan demikian, kerangka pendanaan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025—2029 disusun selaras dengan arah kebijakan, sasaran, dan target kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa agar pelaksanaan program kebahasaan dan kesastraan di daerah dapat berjalan optimal dan terukur.



Tabel 4.4 Pendanaan Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025—2029

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Pendanaan (dalam ribuan)				
			2025	2026	2027	2028	2029
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi						
SK.1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik						
IKK 1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	1.319.302	1.360.200	1.402.367	1.445.840	1.319.302
IKK 1.2	Persentase Produk Penerjemahan Yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	1.129.554	682.110	703.255	725.056	747.533
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia						
SK 2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia						
IKK 2.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesinya	Persentase	350.000	221.759	228.634	235.721	243.029
IKK 2.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persentase	1,408,984	1,121,350	1,156,111	1,191,952	1,228,902
SK 3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan						
IKK 3.1	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persentase	166.675	203.442	209.749	216.251	222.955
IKK 3.2	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persentase	608.000	210.223	216.740	223.459	230.386
SK 4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra						
IKK 4.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	145,365	378,087	389,807	401,891	414,350
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah						
SK 5	Meningkatnya Fasilitasi di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra						
IKK 5.1	Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Persentase	114.870	174.117	179.515	185.080	190.817
IKK 5.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	1,782,264	1,446,754	1,491,604	1,537,843	1,585,516
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia						



Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target Pendanaan (dalam ribuan)				
			2025	2026	2027	2028	2029
SK 6	Meningkatnya fasilitasi terhadap lembaga penyelenggara program BIPA						
IKK 6.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terasilitasi (Dalam Negeri)	Persentase	98.296	136.000	140.216	144.563	149.044
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
SK 7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa						
IKK 7.1	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat Baik	Kategori	3,802,701	4,984,750	5,139,277	5,298,595	5,462,851
IKK 7.2	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A	Predikat	469,825	974,416	245,894	253,516	261,375





KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

កម្មវិធីអប់រំបង្រៀនអំពីភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី

BALAI BAHASA

បន្ទីរភាសា

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលភាសាឥណ្ឌូនេស៊ី

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

CANTIK
Cepat, Akuntabel, Netral,
Transparan, Inovatif, dan Kolaboratif

**#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA**

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

BANGGA,
MAHIR, DAN MAJU
DENGAN
BAHASA INDONESIA



BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat disusun dalam rangka memperkuat pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter sebagaimana yang dimandatkan kepada Kementerian. Rencana Strategis ini disusun untuk membawa perubahan dalam rangka pelestarian dan pemajuan bahasa dan sastra Indonesia serta pengarusutamaan dalam bidang pendidikan dan penguatan akuntabilitas dan transparansi tata kelola organisasi dan lembaga. Selain itu, Rencana Strategis ini disusun untuk memperkuat peran Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai unit pelaksana teknis yang memiliki mandat melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan bahasa dan sastra di Nusa Tenggara Barat.

Rencana Strategis ini telah menjabarkan visi dan misi beserta sasaran strategis dalam rangka mencapai sasaran program Badan Bahasa dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran strategis, sasaran program, dan sasaran kegiatan serta dilengkapi dengan indikator keberhasilannya guna untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Rencana Strategis ini menekankan komitmen Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan seluruh rencana dan program yang telah ditetapkan dalam mencapai visi pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan visi pemerintah untuk membangun sumber daya manusia unggul dan berdaya saing global. Dalam Rencana Strategis ini, dijabarkan pula program kegiatan terkait kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, institusi pendidikan, serta masyarakat. Kolaborasi berbagai pihak merupakan kunci keberhasilan pembangunan bahasa dan sastra bagi masyarakat, terutama yang berada di Nusa Tenggara Barat.

Rencana Strategis Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan strategis tetapi juga menjadi panduan yang dinamis dan responsif terhadap perubahan, mempertegas peran bahasa dan sastra dalam memperkuat persatuan bangsa. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi berkala, penyesuaian kebijakan, serta memantau capaian indikator kinerja untuk menjamin pencapaian tujuan dalam rangka meningkatkan kualitas pembangunan kebahasaan dan kesastraan.



LAMPIRAN 1 MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BALAI BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target					Target Pendanaan (dalam ribuan)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
7569	Peningkatan Kecakapan Literasi											
SK.1	Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik											
IKK 1.1	Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca	Persentase	64	68	72	76	80	1.319.302	1.360.200	1.402.367	1.445.840	1.319.302
IKK 1.2	Persentase Produk Penerjemahan Yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik	Persentase	24	30	36	42	48	1.129.554	682.110	703.255	725.056	747.533
7567	Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia											
SK 2	Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia											
IKK 2.1	Persentase Penutur Teruji yang sesuai dengan Predikat Kemahiran Berbahasa Profesi	Persentase	41	43	45	47	49	350.000	221.759	228.634	235.721	243.029
IKK 2.2	Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya	Persentase	60	63	66	69	72	1,408,984	1,121,350	1,156,111	1,191,952	1,228,902
SK 3	Meningkatnya Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan											
IKK 3.1	Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya	Persentase	59,93	63,13	66,34	69,54	72,75	166.675	203.442	209.749	216.251	222.955
IKK 3.2	Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya	Persentase	50	55	60	65	70	608.000	210.223	216.740	223.459	230.386

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target					Target Pendanaan (dalam ribuan)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
SK 4	Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra											
IKK 4.1	Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi	Persentase	11,55	23,1	34,66	46,21	57,76	145,365	378,087	389,807	401,891	414,350
7566	Pelestarian Bahasa dan Sastra Daerah											
SK 5	Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra											
IKK 5.1	Persentase Penambahan Bahasa, Sastra, dan Aksara yang Terverifikasi dalam Peta Kebinekaan	Persentase	6,4	17,6	17,9	18,5	18,8	114.870	174.117	179.515	185.080	190.817
IKK 5.2	Rasio Pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas	Rasio	01:18	01:20	01:22	01:25	01:30	1,782,264	1,446,754	1,491,604	1,537,843	1,585,516
7568	Penginternasionalan Bahasa dan Sastra Indonesia											
SK 6	Meningkatnya fasilitas terhadap lembaga penyelenggara program BIPA											
IKK 6.1	Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)	Persentase	50	55,5	56	56,5	57	98.296	136.000	140.216	144.563	149.044
7613	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa											
SK 7	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa											
IKK 7.1	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Kategori Nilai Kinerja Anggaran Sangat	Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	3,802,701	4,984,750	5,139,277	5,298,595	5,462,851

Kode	Sasaran Kegiatan (SK)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	Target					Target Pendanaan (dalam ribuan)				
			2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
	Baik											
IKK 7.2	Persentase Satuan Kerja di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah minimal A	Predikat	A	A	A	A	A	469,825	974,416	245,894	253,516	261,375

LAMPIRAN 2: DEFINISI OPERASIONAL

Indikator Kinerja Kegiatan 1.1

Program	: Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	: Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKK	: Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membaca
Definisi	Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu di semua jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA sederajat). Peserta didik diharapkan mendapat peningkatan dan penguatan kecakapan literasi untuk mendukung kompetensi akademiknya di sekolah, khususnya terkait dengan kecakapan literasi membaca. Sasaran peserta didik yang akan ditingkatkan kecakapan literasi membacanya adalah peserta didik di sekolah yang hasil Asesmen Nasional (AN) pada aspek AKM literasi membacanya masih berkategori rendah (Kategori 1 atau Kategori 2). Peserta didik tersebut akan diberi peningkatan dan penguatan literasi melalui aktivitas membaca buku, artikel, karya sastra, dan lain-lain. Aktivitas membaca yang dilakukan oleh peserta didik akan disesuaikan dengan jenjang pendidikannya (SD, SMP, atau SMA), seperti mengulas buku, membaca cepat, dan membaca kritis dan analitis. Buku yang digunakan untuk praktik membaca juga akan disesuaikan dengan jenjang kemampuan membaca peserta didik. Ukuran dalam bentuk persen (%) yang menunjukkan jumlah peserta didik yang mengalami peningkatan kemampuan atau kualitas dalam membaca dan memahami bacaan, dibandingkan dengan jumlah seluruh peserta didik yang dinilai.
Metode Perhitungan	: Jumlah peserta didik yang naik kemampuan membacanya dibagi dengan jumlah Peserta Didik yang telah mengikuti kegiatan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca dikali 100%. $PPDM = \frac{\sum PDML}{\sum SPDI} \times 100\%$ PPDM= Persentase Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya PDML = Jumlah Peserta Didik yang Meningkatkan Kualitas Literasi Membacanya SPDI = Jumlah Peserta Didik yang telah diintervensi dengan aktivitas literasi membaca
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	: Balai/Kantor Bahasa
Variabel Data	1. Peserta Didik yang mendapatkan peningkatan dan penguatan kecakapan literasi membaca. 2. Peserta Didik yang naik kemampuan membacanya setelah diberi intervensi peningkatan dan penguatan kecakapan
Instalasi Penghasil Data	: Balai/Kantor Bahasa
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	Makin tinggi persentase kenaikan kemampuan membaca Peserta Didik makin tinggi tingkat kecakapan literasi membaca Peserta Didik
Periode Pengumpulan data	: Tahunan
Publikasi Ketersediaan indikator	: -

Level Estimasi	:	Nasional dan wilayah
Klasifikasi	:	Peserta Didik SD, SMP, dan SMA
Apakah Indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi Penyajian Data	:	Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan 1.2

Program	: Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran
SK	: Meningkatnya Kecakapan Literasi Membaca Peserta Didik
IKK	: Presensase Produk Penerjemahan yang Di Manfaatkan oleh Peserta Didik
Definisi	: Persentase pengembangan produk bahasa dan sastra yang dimanfaatkan oleh peserta didik adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan seberapa besar proporsi produk hasil pengembangan bahasa dan sastra (seperti kamus, pedoman, cerita bergambar, dan komik) yang telah digunakan, dibaca, atau dimanfaatkan dalam kegiatan belajar, literasi, atau kegiatan lainnya oleh peserta didik pada jenjang dasar dan menengah.
Metode Penghitungan	: Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan Peserta Didik (PPDP) diperoleh dari jumlah peserta didik yang menggunakan produk dibagi jumlah peserta didik yang menjadi sampel dikali 100 Agar indeks ini dapat dihitung, diperlukan: instrumen survei untuk peserta didik, jumlah sampel per jenjang pendidikan, dan identifikasi responden yang pernah menggunakan/memanfaatkan produk. Penentuan jumlah sampel peserta didik per jenjang dasar dan menengah untuk survei pemanfaatan produk bahasa dan sastra dapat dilakukan secara statistik dengan memperhatikan prinsip representatif, efisien, dan terukur. Rumus persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik adalah sebagai berikut:

$$PPDP (\%) = \frac{Pp}{Ps} \times 100\%$$

Keterangan:

PPDP : Persentase Produk Pengembangan yang Dimanfaatkan oleh Peserta Didik

Pp : jumlah peserta didik yang menggunakan produk

Ps : jumlah peserta didik yang menjadi sampel

Satuan	: Persentase %
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Sumber Data	: Data survei pemanfaatan produk pengembangan oleh peserta didik
Variabel data	: 1. peserta didik yang menggunakan produk 2. peserta didik yang menjadi sampel 3. produk pengembangan bahasa dan sastra bagi peserta didik
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	Nilai PPDP menunjukkan persentase produk pengembangan yang dimanfaatkan oleh peserta didik. Rentang interpretasi:

0-25%	Sangat Rendah (Produk hampir tidak dimanfaatkan. Daya jangkau atau daya tarik sangat minim.)
26-50%	Rendah (Produk mulai dikenal, namun masih belum banyak digunakan secara aktif.)
51-75%	Cukup Tinggi (Produk cukup dimanfaatkan dan berpotensi lebih luas digunakan.)
76-100%	Sangat Tinggi (Produk telah berhasil menjangkau dan dimanfaatkan luas oleh peserta didik.)

Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: Dokumen Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tersedia di laman resmi Badan Bahasa: https://badanbahasa.kemdikbud.go.id/ dan

Dokumen Renstra Balai Bahasa Provinsi NTB	
Level Estimasi	: Nasional dan provinsi
Klasifikasi	: Peserta didik dasar dan menengah
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan 2.1

Program	: Pemartabatan Bahasa dan Sastra Indonesia
SK	: Meningkatnya Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
IKK	: Persentase penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya
Definisi	: Persentase penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya merupakan indikator untuk mendukung angka kemahiran berbahasa Indonesia secara nasional.
	Penutur teruji merupakan masyarakat yang teridentifikasi profesinya dan telah mengikuti UKBI Adaptif serta mendapatkan sertifikat uji. Predikat kemahiran berbahasa Indonesia merupakan predikat yang diperoleh dari hasil UKBI Adaptif yang terdiri atas predikat Istimewa, Sangat Unggul, Unggul, Madya, Semenjana, Marginal, dan Terbatas. Standar Kemahiran berbahasa Indonesia ditetapkan dalam sebuah peraturan Menteri yang mengatur standar Kemahiran berbahasa Indonesia setiap profesi.
Metode Penghitungan	: Jumlah penutur teruji pada setiap profesi yang mengikuti UKBI Adaptif dan mendapat skor sesuai dengan dan lebih dari predikat kemahirannya pada peraturan tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia dibandingkan dengan jumlah penutur pada setiap profesi setiap tahun yang mengikuti UKBI Adaptif $PPT = \frac{PSS}{PSP} \times 100\%$ PPT : Persentase Penutur Teruji PSS : Jumlah penutur setiap profesi yang mendapat predikat sesuai dengan dan lebih dari standar PSP : Jumlah keseluruhan penutur setiap profesi yang mengikuti UKBI Metode perhitungan nasional $PPTN = \frac{PPT \text{ Provinsi}}{\text{Jumlah Provinsi}}$ Keterangan: PPTN: Rerata Persentase Penutur Teruji secara nasional PPTP: Jumlah Persentase Penutur Teruji di Setiap Provinsi JP: Jumlah provinsi
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Non Kumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	: Balai Bahasa Provinsi NTB
Variabel data	: 1. Waktu 2. Sumber daya 3. Pemahaman terhadap petunjuk teknis
Instansi Penghasil Data	: Badan Bahasa dan Balai/Kantor Bahasa
Polarisasi Indikator	: Stabil: nilai aktual/realisasi indikator diharapkan berada pada suatu rentang target tertentu
Interpretasi	Makin tinggi persentase penutur teruji yang sesuai dengan standar kemahiran berbahasa profesinya, makin tinggi angka kemahiran berbahasa Indonesia.
Periode Pengumpulan Data	: Data dilaporkan pada akhir tahun pada setiap aktivitas
Publikasi ketersediaan indikator	: -
Level Estimasi	: 1. Nasional: yang merupakan data akumulasi dan rerata dari tiga puluh unit pelaksana teknis pelaksana

2. Provinsi: Data dapat dihasilkan dari setiap unit kerja pelaksana		
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Tidak
Frekuensi penyajian data	:	Setiap tahun

Indikator Kinerja Kegiatan 2.2

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	: Meningkatkan Kompetensi Penutur Bahasa Indonesia
IKK	: Persentase Penutur Bahasa yang Meningkatkan Kualitas Berbahasanya
Definisi	: Persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya dapat diketahui setelah penutur bahasa dibina melalui aktivitas peningkatan kemahiran berbahasa. Penutur bahasa adalah pengguna bahasa Indonesia yang tugas dan perannya berhubungan dengan pemanfaatan bahasa Indonesia, baik melalui lisan maupun tulisan. Pembinaan penutur bahasa bertujuan untuk meningkatkan sikap positif terhadap bahasa Indonesia, meningkatkan mutu penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai ranah, dan meningkatkan kemampuan berbahasa Indonesia dalam konteks profesional ataupun sehari-hari. Dasar hukum pembinaan penutur bahasa adalah Pasal 36 UUD NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Tahap pembinaan terhadap penutur bahasa terdiri atas penilaian awal, pembekalan/penyampaian materi, pendampingan, dan penilaian akhir. Penilaian awal
Metode Penghitungan	: Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah peserta yang mengalami kenaikan nilai dan jumlah peserta pembinaan, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PPB = \frac{PM}{PT} \times 100\%$ Keterangan PPB = persentase penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya PM = jumlah penutur bahasa yang meningkat nilainya PT = jumlah penutur bahasa terbina
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra dan Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	: Laporan Internal
Variabel data	: 1. Penutur yang terbina 2. Penutur bahasa yang meningkat kualitas berbahasanya
Instansi Penghasil Data	: Balai/kantor Bahasa
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	: Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: Ya
Level Estimasi	: Provinsi
Klasifikasi	: Tidak
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Setahun sekali

Indikator Kinerja Kegiatan 3.1

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	: Meningkatkan Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
IKK	: Persentase Lembaga Terbina yang Meningkatkan Kualitas Penggunaan Bahasanya
Definisi	: Persentase lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya dapat diketahui setelah lembaga dibina melalui aktivitas pembinaan lembaga dalam pengutamaan bahasa negara. Lembaga yang mendapat pembinaan adalah lembaga pemerintah, lembaga swasta, dan/atau lembaga pendidikan yang karena tugas dan fungsinya menggunakan bahasa Indonesia di lanskap dan pada dokumen. Dasar hukum pembinaan lembaga adalah Pasal 36 UU NRI 1945 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia; UU Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan; PP Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; Perpres Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia; Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia; dan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengutamaan Bahasa Negara di Ruang Publik. Pembinaan lembaga dilaksanakan dalam empat bentuk kegiatan yang terdiri atas (1) sosialisasi, (2) pemantauan, (3) pendampingan, dan (4) evaluasi. Sosialisasi dilakukan untuk mencegah kesalahan penggunaan bahasa Indonesia melalui peningkatan sikap positif berbahasa Indonesia. Pemantauan dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis secara objektif sikap bahasa lembaga dan situasi penggunaan bahasa Indonesia di lanskap dan dokumen lembaga. Pendampingan dilakukan untuk menyajikan data, memberikan konsultasi, dan melaksanakan asistensi praktik baik penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga yang dibina. Evaluasi merupakan penilaian berdasarkan berbagai bukti objek bahasa untuk mengukur dampak dan efektivitas kegiatan pemantauan dan pendampingan yang telah dilakukan. Pengukuran peningkatan kualitas berbahasa lembaga dilakukan dengan melakukan penilaian terhadap objek bahasa tulis di lanskap, objek bahasa tulis pada dokumen, dan sikap bahasa. Penilaian bahasa tulis di lanskap dilakukan pada objek bahasa yang terdapat pada ruang publik lembaga yang dibina. Adapun penilaian bahasa tulis pada dokumen dilakukan pada objek bahasa yang merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh lembaga yang dibina. Penilaian objek bahasa tulis di lanskap dan pada dokumen dilakukan terhadap objek yang masih terdapat kesalahan penggunaan bahasanya. Selanjutnya, penilaian sikap bahasa ditujukan bagi pimpinan lembaga atau pemangku kepentingan. Lembaga dikatakan meningkat kualitas penggunaan bahasanya jika terdapat peningkatan nilai akhir minimal 5% dari nilai awal.
Metode Penghitungan	: Penghitungan dilakukan dengan cara membandingkan antara jumlah lembaga yang mengalami kenaikan kualitas penggunaan bahasa dan jumlah seluruh lembaga yang dibina, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PLT = \left(\frac{LM}{LT} \right) \times 100\%$ Keterangan: PLT = persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya LM = jumlah lembaga yang meningkat nilai penggunaan bahasanya LT = jumlah lembaga terbina
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Sumber Data	: Laporan Internal
Variabel data	: 1. Lembaga yang terbina 2. Lembaga yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya
Instansi Penghasil Data	: Unit Pelaksana Teknis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Polarisasi Indikator	:	Maksimal
Interpretasi		Makin tinggi nilai aktual/realisasi indikator terhadap target, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Ya
Level Estimasi	:	Provinsi
Klasifikasi	:	Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Setahun sekali

Indikator Kinerja Kegiatan 3.2

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	: Meningkatkan Partisipasi Lembaga dan Komunitas dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan
IKK	: Persentase Komunitas Penggerak Literasi Terbina yang Meningkatkan Kualitas Kinerjanya
Definisi	: Komunitas penggerak literasi adalah komunitas yang bergerak dalam pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pembelajaran, dan penguatan aktivitas membaca dan menulis. Kinerja komunitas ini dapat dikategorikan dalam tiga, yaitu kategori A (13 indikator), kategori B (10 indikator), dan kategori C (6 indikator). Untuk meningkatkan kinerja komunitas diperlukan pembinaan. Keberhasilan pembinaan ditunjukkan dengan meningkatnya kategori komunitas literasi dari kategori C ke kategori yang lebih tinggi atau kategori B ke kategori A.
Metode Penghitungan	: Rumus penghitungan adalah Jumlah komunitas literasi yang meningkat kinerjanya dibagi dengan jumlah total komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu dikalikan 100%

$$PKL = \frac{\Sigma KLM}{\Sigma SKLT} \times 100\%$$

Keterangan:

PKL = Persentase Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya

SKLM = Komunitas Literasi yang Meningkatkan Kinerjanya.

SSKLT = Seluruh Komunitas Literasi yang telah dibina/mendapat pendampingan, fasilitasi, atau dukungan langsung dari Badan Bahasa

Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: 1. Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra 2. Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	: Data Pokok Kebahasaan
Variabel data	: 1. Komunitas literasi yang meningkat kinerjanya 2. Komunitas literasi yang dilakukan pembinaan dalam suatu periode tertentu
Instansi Penghasil Data	: Balai/Kantor Bahasa
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	: Makin tinggi tingkat komunitas penggerak literasi terbina yang meningkat kualitas kinerjanya maka makin tinggi efektivitas program pembinaan, keberhasilan pendampingan, dan tingginya motivasi komunitas dalam pengembangan kebahasaan dan kesastraan.
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: Ya
Level Estimasi	: Provinsi
Klasifikasi	: Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Setahun sekali

Indikator Kinerja Kegiatan 4.1

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	: Meningkatnya Kualitas Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra
IKK	: Persentase Penambahan Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra yang Tervalidasi
Definisi	: Produk pengembangan bahasa dan sastra disebut tervalidasi jika dalam proses penyusunannya sudah melalui tahapan pembakuan dan kodifikasi. Pembakuan adalah proses, cara, dan perbuatan menentukan aturan bahasa yang diwujudkan dalam bentuk kaidah bahasa. Sementara itu, kodifikasi adalah pencatatan norma yang telah dihasilkan oleh pembakuan dalam bentuk seperti tata bahasa, pedoman lafal, pedoman ejaan, pedoman pembentukan istilah, dan kamus. Hal ini tertuang dalam Permendikbudristek Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pembakuan dan Kodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia.

Tahapan dari proses pembakuan berujung pada validasi. Proses lengkapnya adalah seleksi - elaborasi - verifikasi - validasi. Setelah pembakuan, dilakukan proses kodifikasi dengan tahapan pencatatan - penyelarasan - penyuntingan - penerbitan. Seleksi merupakan langkah awal dalam pembakuan untuk menentukan materi dari korpus melalui pencarian, pengumpulan, dan pemilihan.

Elaborasi merupakan perluasan cakupan materi hasil seleksi secara terperinci dan cermat, yang dilakukan melalui analisis, klasifikasi, dan kategorisasi terhadap data kebahasaan dan kesastraan.

Verifikasi merupakan pemeriksaan kebenaran konsep hasil elaborasi dengan memanfaatkan sumber rujukan yang dilakukan, melalui pemeriksaan konsep, penyelarasan konsep, konsultasi dan diskusi yang melibatkan pakar, akademisi, praktisi, dan/atau masyarakat adat.

Validasi merupakan pengesahan konsep hasil pembakuan yang dilakukan melalui sidang validasi pakar dan pengesahan hasil validasi. Validasi dilakukan oleh Kepala Badan.

Metode Penghitungan	: Penghitungan dilakukan dengan cara membagi jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra pada satu tahun dengan produk pengembangan yang sudah ada, kemudian dikali seratus persen. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.
---------------------	--

$$PPP (\%) = \frac{PB}{PA} \times 100\%$$

Keterangan:

PPP: Persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi

PB: Jumlah produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi

PA: Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra yang sudah ada

Satuan	: Persentase (%)
Tipe Penghitungan	: Kumulatif
Unit Pelaksana	: 1. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	: Laporan Internal
Variabel data	: 1. Produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi 2. Produk baru pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi
Instansi Penghasil Data	: 1. Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 2. Balai/Kantor Bahasa
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	Makin tinggi persentase penambahan produk pengembangan bahasa dan sastra tervalidasi makin baik kinerja program dalam menghasilkan produk sesuai standar
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: Renstra Badan Bahasa dan Renstra Balai/Kantor Bahasa
Level Estimasi	: Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	: Produk

Apakah indikator dapat : Ya
diakses oleh Umum

Frekuensi penyajian data : Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan 5.1

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	: Meningkatnya Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
IKK	: Persentase penambahan bahasa, sastra, dan aksara dalam Peta Kebinekaan
Definisi	: Penambahan jumlah (entitas) bahasa, sastra, dan aksara yang terverifikasi dan/atau terdokumentasi terhadap jumlah entitas bahasa, sastra dan aksara yang terpetakan dikalikan seratus. Penambahan entitas bahasa dalam pemetaan, meliputi bahasa, dialek, subdialek, atau beda wicara
Metode Penghitungan	: Perhitungan dilakukan dengan cara menghitung penambahan tiap-tiap entitas bahasa, sastra dan/atau aksara dibagi dengan jumlah entitas bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan dikalikan seratus. Perhitungan dilakukan dengan rumus berikut. $PPB = \frac{x}{n} \times 100\%$ Keterangan: PPB = persentase penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara dalam Peta Kebinekaan x = penambahan bahasa, sastra, dan/atau aksara n = Jumlah bahasa, sastra, dan aksara yang sudah terpetakan
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	: Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Variabel data	: Data bahasa, sastra, dan aksara yang diverifikasi
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	Makin besar persentase penambahan verifikasi bahasa, sastra dan/atau aksara, makin baik capaian kinerjanya.
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Level Estimasi	: Nasional
Klasifikasi	: Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Setiap tahun

Indikator Kinerja Kegiatan 5.2

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	: Meningkatkan Fasilitas di Bidang Pelindungan Bahasa dan Sastra
IKK	: Rasio pengajar Bahasa Daerah Terhadap Penutur Muda yang Terimbas
Definisi	: Perbandingan setiap pengajar utama bahasa daerah yang didukung oleh pengajar sejawat terhadap penutur muda yang mempelajari dan/atau menggunakan bahasa daerah di berbagai ranah, antara lain sekolah, keluarga, komunitas, dan, masyarakat.
Metode Penghitungan	: Jumlah pengajar utama dibandingkan dengan jumlah penutur muda bahasa daerah dikalikan konstanta.
Satuan	: Rasio
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	: Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Variabel data	: 1. Jumlah guru utama 2. Jumlah pemelajar terimbas
Instansi Penghasil Data	: Balai/Kantor Bahasa
Polarisasi Indikator	: Minimal 5 capaian penutur muda
Interpretasi	Makin besar proporsi penutur muda, makin baik capaian kinerja setiap pengajar utama. Capaian guru utama tersebut didukung oleh pengajar sejawat yang merupakan hasil pengimbasan.
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: Data Pokok Kebahasaan, Peta Bahasa, Registrasi Bahasa dan Sastra
Level Estimasi	: Nasional dan Provinsi
Klasifikasi	: Tidak ada
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Setiap tahun

Indikator Kinerja Kegiatan 6.1

Program	: Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan
SK	: Meningkatnya Fasilitas terhadap Lembaga Penyelenggara Program BIPA
IKK	: Persentase Lembaga Penyelenggara Program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) Terfasilitasi (Dalam Negeri)
Definisi	: Persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA adalah angka persen yang menunjukkan perbandingan jumlah penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitas pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi
Metode Penghitungan	: Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitas pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dibagi jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi dan dikali angka 100 dalam satuan persen (%). Rumus penghitungan indikator:
$PL = \frac{l}{n} \times 100 (\%)$ Keterangan: PL = Persentase lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA L = Jumlah lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA n = Jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA di dalam negeri yang teridentifikasi	
Satuan	: Persentase
Tipe Penghitungan	: Nonkumulatif
Unit Pelaksana	: 1. Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra 2. Balai/Kantor Bahasa
Sumber Data	: 1. BIPA Daring 2. Dapobas 3. Laporan Internal
Variabel data	: Data jumlah lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang menerima fasilitas pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa; data jumlah total lembaga penyelenggara program BIPA (lembaga pendidikan dasar, menengah, dan tinggi; lembaga kursus dan pelatihan) di dalam negeri yang teridentifikasi
Instansi Penghasil Data	: Pusat Pemberdayaan Bahasa dan Sastra dan Balai/Kantor Bahasa
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	Makin tinggi persentase lembaga penyelenggara program bahasa Indonesia bagi penutur asing di dalam negeri yang terfasilitasi pengembangan program BIPA dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menunjukkan makin banyaknya lembaga penyelenggara program BIPA yang dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas layanan pembelajarannya kepada pemelajar BIPA yang dapat berdampak pada makin banyaknya penutur asing yang terlayani pembelajaran bahasa Indonesia yang berkualitas sehingga dapat mendorong meningkatnya fungsi bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional.
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: Laman Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Data Pokok Kebahasaan, portal BIPA Daring, Laman Balai/Kantor Bahasa
Level Estimasi	: Provinsi
Klasifikasi	: Tidak ada

Apakah indikator dapat : Ya
diakses oleh Umum

Frekuensi penyajian data : Setiap tahun

Indikator Kinerja Kegiatan 7.1

Program	: Dukungan Manajemen
SK	: Meningkatkan Tata kelola Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
IKK	: Capaian Nilai Kinerja Anggaran Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Definisi	: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) adalah ukuran kinerja pelaksanaan anggaran yang mencerminkan tingkat efektivitas, efisiensi, dan kepatuhan pelaksanaan anggaran oleh satuan kerja terhadap rencana dan target yang telah ditetapkan dalam DIPA. NKA menggambarkan sejauh mana satuan kerja mampu melaksanakan kegiatan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara.
Metode Penghitungan	: $\text{Nilai Kinerja Anggaran} = \text{Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran [50\%]} + \text{Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran [50\%]}$
Satuan	: Kategori
Tipe Penghitungan	: Nonkomulatif
Unit Pelaksana	: Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Sumber Data	: 1. Aplikasi Monev Kemenkeu 2. Aplikasi OMSPAN
Variabel data	: Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran 1. Capaian RO 2. Penggunaan SBK 3. Efisiensi SBK Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran 1. Revisi DIPA 2. Deviasi Halaman 3 DIPA 3. Penyerapan Anggaran 4. Belanja Kontraktual 5. Penyelesaian Tagihan 6. Pengelolaan UP dan TUP 7. Dispensasi SPM 8. Capaian Output
Instansi Penghasil Data	: 1. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat 2. Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan 3. Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan
Polarisasi Indikator	: Maksimal
Interpretasi	: Semakin tinggi Nilai Kinerja Anggaran menunjukkan semakin baik kinerja perencanaan dan pelaksanaan anggaran
Periode Pengumpulan Data	: Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	: -
Level Estimasi	: Nasional
Klasifikasi	: -
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	: Ya
Frekuensi penyajian data	: Tahunan

Indikator Kinerja Kegiatan 7.2

Program	: Dukungan Manajemen
SK	: Meningkatkan Tata kelola Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
IKK	: Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat minimal A
Definisi	: Predikat Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah hasil evaluasi sistematis terhadap kinerja instansi pemerintah, yang menunjukkan tingkat akuntabilitas dan keberhasilan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Predikat ini diberikan berdasarkan skala nilai dari AA (Sangat Memuaskan) hingga D (Sangat Kurang), seperti yang ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).

Metode Penghitungan	Subkomponen				Total Bobot
	Komponen	Subkomponen 1 Keberahaan	Subkomponen 2 Kualitas	Subkomponen 3 Pemanfaatan	
		20%	30%	50%	
	Perencanaan Kinerja	6	9	15	30
	Pengukuran Kinerja	6	9	15	30
	Pelaporan Kinerja	3	4,5	7,5	15
	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5	7,5	12,5	25
	Nilai Akuntabilitas Kinerja	20	30	50	100
Satuan	: Predikat				
Tipe Penghitungan	: Nonkomulatif				
Unit Pelaksana	: Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat				
Sumber Data	: 1. Aplikasi Spasikita 2. Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat				
Variabel data	: 1. Perencanaan Kinerja 2. Pengukuran Kinerja 3. Pelaporan Kinerja 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal				
Instansi Penghasil Data	: Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat				
Polarisasi Indikator	: Maksimal				
Interpretasi	AA (Nilai > 90–100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform). Pengukuran Kinerja telah dilakukan sampai ke level individu			
	A (Nilai > 80–90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/pengawas/Subkoordinator			
	BB (Nilai > 70–80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal, dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator			
	B (Nilai > 60–70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja			
	CC (Nilai > 50–60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik, namun demikian masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar, khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja			
	C (Nilai > 30–50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasikan sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat			

	D (Nilai >0–30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja, sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP
Periode Pengumpulan Data	:	Tahunan
Publikasi ketersediaan indikator	:	Laman Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat
Level Estimasi	:	Nasional
Klasifikasi	:	-
Apakah indikator dapat diakses oleh Umum	:	Ya
Frekuensi penyajian data	:	Tahunan



Balai Bahasa

Provinsi Nusa Tenggara Barat



balaibahasaprovinsintb.kemendikdasmen.go.id



Balai Bahasa Nusa Tenggara Barat



[balaibahasaprovinsintb](https://www.instagram.com/balaibahasaprovinsintb)



Balai Bahasa Provinsi NTB



081217352004

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

BALAI BAHASA

Provinsi Nusa Tenggara Barat

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

ꦑꦸꦤꦶꦁꦠꦺꦁꦒꦫꦼꦧꦠ

Jalan Doktor Rajono, Kelurahan Jempeng Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram Telepon (0370) 623554
Email : kantorbahasantb@kemdikbud.go.id; Laman : kantorbahasantb.kemdikbud.go.id

